



**ANALISIS DAMPAK MEKANISME GOVERNANCE, TEKANAN
STAKEHOLDER, ARUS KAS OPERASI, UKURAN PERUSAHAAN DAN
UMUR PERUSAHAAN TERHADAP SUSTAINABLE FINANCE PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Oleh :

Delia Jayanti Wulandari

NPM : 4116500054

Diajukan Kepada :

**Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal
2020**



**ANALISIS DAMPAK MEKANISME GOVERNANCE, TEKANAN
STAKEHOLDER, ARUS KAS OPERASI, UKURAN PERUSAHAAN DAN
UMUR PERUSAHAAN TERHADAP SUSTAINABLE FINANCE PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen
Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

Delia Jayanti Wulandari

NPM : 4116500054

Diajukan Kepada:

**Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal
2020**



**ANALISIS DAMPAK MEKANISME GOVERNANCE, TEKANAN
STAKEHOLDER, ARUS KAS OPERASI, UKURAN PERUSAHAAN DAN
UMUR PERUSAHAAN TERHADAP SUSTAINABLE FINANCE PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Oleh :

Delia Jayanti Wulandari

NPM : 4116500054

Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal : 18 Juli 2020

Dosen Pembimbing I

Niken Wahyu C, SE, MM
NIDN. 0604097701

Dosen Pembimbing II

Yuni Utami, SE,MM
NIDN. 0616067602

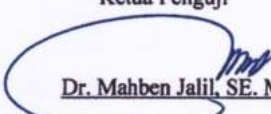
Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen

Yuni Utami, SE,MM
NIDN. 0616067602

Pengesahan Skripsi

Nama : Delia Jayanti Wulandari
NPM : 4116500054
Judul : Analisis Dampak Mekanisme Governace, Tekanan Stakeholder, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan, dan Umumr Perusahaan Terhadap Sustainable Finance Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019
Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 18 Juli 2020

Ketua Penguji


Dr. Mahben Jalil, SE. MM

NIDN. 0611037202

Pengji I


Niken Wahyu Cahyaningtyas, S.E.M.M
NIDN. 0604097701

Pengji II


Agnes Dwita S. S.E.M.M
NIDN. 0616088402

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen


Yuni Utami, S.E.M.M

NIDN. 0616067602



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Orang-orang yang sukses harus belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan, hal yang memang harus dikerjakan, apa pun yang mereka inginkan atau tidak." (Aldus Huxley)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang senantiasa selalu mendo'akan, memotivasi , rasa sayang dan perhatian yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
2. Teman dan sahabat yang saya sayangi yang selalu menemani, memberikan semangat dan support untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
3. Semua Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal dan almamaterku tercinta, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas ilmunya, bimbingan, motivasi serta kritik dan saran atas terselesaikanya skripsi ini.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Delia Jayanti Wulandari
NPM : 4116500054
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Analisis Dampak Mekanisme Governance, Tekanan Stakeholder, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Sustainable Finance Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, memanipulasi dan pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 20 Juli 2020


Delia Jayanti wulandari

ABSTRAK

Delia Jayanti Wulandari, 2019, Analisis Dampak Mekanisme Governance, Tekanan Stakeholder, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Sustainable Finance Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perekonomian di Indonesia khususnya pada sektor perbankan yang mengalami beragam permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi adanya tingkat inflasi yang tinggi yang menyebabkan perekonomian tidak stabil (naik-turun). Salah satu faktor agar tingkat inflasi tetap stabil adalah menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate dan pengungkapan *sustainable finance* pada sektor perbankan di Indonesia masih minim serta masih belum optimal karena hanya sebagian perbankan yang menerapkan *sustainable finance*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak terhadap *sustainable finance*. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan tahun 2015-2019 dan sampel penelitian sebanyak 8 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS versi 22 dan microsoft excel. Hasil penelitian membuktikan bahwa dewan direksi, komite audit, tekanan karyawan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *sustainable finance* sedangkan komisaris indepeenden dan arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance*.

Kata kunci : Sustainable Finance, Mekanisme Governance, Tekanan Karyawan, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan

ABSTRACT

Delia Jayanti Wulandari, 2019, Analysis Of The Impact Of Governance Mechanisms, Stakeholder Pressure, Operating Cash Flows, Company Size And The Company's Age To Sustainable Finance In The Banking Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange Year 2015-2019.

Research is backed by the economy in Indonesia, especially in the banking sector that has a variety of problems. The problem is that there is a high level of inflation that causes the economy to be unstable. One factor to keep inflation rate steady is to raise the benchmark rate of BI 7-Day Repo Rate and the disclosure of sustainable finance in the banking sector in Indonesia is still minimal and still not optimal because only part of banking that implement sustainable finance.

The purpose of this research is to analyse the impact on sustainable finance. The research object was a banking company in 2015-2019 and a sample of 8 research companies using the purposive sampling method. The research method used is a double linear regression analysis. The analysis tools used are SPSS version 22 and Microsoft Excel. The results of the study proved that the board of directors, audit committee, employee pressure, company size and company's age influence on sustainable finance while the commissioner of indepeenden and cash flow operations have no effect on sustainable finance.

Keywords : Sustainable Finance, Governance Mechanisms, Stakeholder Pressure, Operating Cash Flows, Company Size, Company Age

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Dampak Mekanisme Governance, Tekanan Stakeholder, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Sustainable Finance Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika Dien Noviany R, S.E., M.M., Akt, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Yuni Utami, SE, MM selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Niken Wahyu C, SE, MM selaku dosen pembimbing I yang sudah begitu sabar dalam membimbing, memberikan saran, memotivasi kepada peneliti dan memberikan waktu luang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

4. Yuni Utami, SE, MM selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dalam membimbing, selalu memotivasi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kami menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 16 Juni 2020

Delia Jayanti Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12

A. Landasan Teori.....	12
1. Sustainable Finance	12
2. Mekanisme Governance	17
3. Tekanan Stakeholder	24
4. Arus Kas Operasi.....	28
5. Ukuran Perusahaan	29
6. Umur Perusahaan	30
B. Studi Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	38
D. Perumusan Hipotesis	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Populasi Dan Sampel.....	47
C. Definisi Konseptual Dan Operasionalisasi Variabel.....	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	59
E. Metode Analisis Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Gambaran Umum	72
B. Hasil Penelitian	93
C. Pembahasan	135
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143

B. Saran.....	144
C. Keterbatasan Peneliti.....	145
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	152

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Hasil Pengambilan Sampel	48
Tabel 3.2 Daftar Sampel Perusahaan Perbankan Tahun 2015-2019	48
Tabel 3.3 Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian	58
Tabel 3.4 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi.....	63
Tabel 4.1 Data Anggota Dewan Direksi Tahun 2015-2019.....	94
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Dewan Direksi	96
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Komisaris Independen Tahun 2015-2019	96
Tabel 4.4 Hasil Analisis Statistik Komisaris Independen	99
Tabel 4.5 Data Anggota Komite Audit Tahun 2015-2019.....	100
Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Komite Audit	102
Tabel 4.7 Data Perhitungan Jumlah Tekanan Karyawan Tahun 2015-2019	103
Tabel 4.8 Hasil Analisis Statistik Tekanan Karyawan.....	104
Tabel 4.9 Data Perhitungan Arus Kas Operasi Tahun 2015-2019	105
Tabel 4.10 Hasil Analisis Statistik Arus Kas Operasi	107
Tabel 4.11 Data Perhitungan Total Aset Perusahaan Tahun 2015-2019	108
Tabel 4.12 Hasil Analisis Statistik Ukuran Perusahaan.....	111
Tabel 4.13 Data Perhitungan Umur Perusahaan Tahun 2015-2019	112
Tabel 4.14 Hasil Analisis Statistik Umur Perusahaan	113
Tabel 4.15 Kategori Perhitungan Item Sustainable Finance Tahun 2015-2019..	114
Tabel 4.16 Hasil Analisis Statistik Sustainable Finance.....	117
Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test	118

Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolonieritas	121
Tabel 4.19 Hasil Uji Heteroskedastisitas	122
Tabel 4.20 Hasil Uji Autokorelasi	124
Tabel 4.21 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	125
Tabel 4.22 Hasil Uji Statistik T	128
Tabel 4.23 Hasil Uji Statistik F	133
Tabel 4.24 Hasil Uji Koefisien Determinasi	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran	45
Gambar 3.1 Kurva Uji Statistik T	66
Gambar 3.2 Kurva Uji Statistik F	70
Gambar 4.1 Grafik Deskriptif Dewan Direksi Tahun 2015	95
Gambar 4.2 Grafik Deskriptif Komisaris Independen Tahun 2015-2019	98
Gambar 4.3 Grafik Deskriptif Komite Audit Tahun 2015-2019	101
Gambar 4.4 Grafik Deskriptif Tekanan Karyawan Tahun 2015-2019	104
Gambar 4.5 Grafik Deskriptif Arus Kas Operasi Tahun 2015-2019	106
Gambar 4.6 Grafik Deskriptif Ukuran Perusahaan Tahun 2015-2019	110
Gambar 4.7 Grafik Deskriptif Umur Perusahaan Tahun 2015-2019	112
Gambar 4.8 Kategori Item Sustainable Finance Tahun 2015-2019	116
Gambar 4.9 Grafik Deskriptif Sustainable Finance Tahun 2015-2019	116
Gambar 4.10 Histogram Uji Normalitas	119
Gambar 4.11 Grafik P-Plot Of Regression Standardized Residual	119
Gambar 4.12 Hasil Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Populasi Perusahaan Perbankan Tahun 2015-2019.....	152
Lampiran 2 Data Sampel Perusahaan Perbankan Tahun 2015-2019.....	154
Lampiran 3 Hasil Perhitungan Semua Variabel Penelitian Tahun 2015-2019 ...	155
Lampiran 4 Hasil Perhitungan Dewan Direksi Tahun 2015-2019	156
Lampiran 5 Hasil Perhitungan Komisaris Independen Tahun 2015-2019.....	157
Lampiran 6 Hasil Perhitungan Komite Audit Tahun 2015-2019	158
Lampiran 7 Hasil Perhitungan Tekanan Karyawan Tahun 2015-2019	159
Lampiran 8 Hasil Perhitungan Arus Kas Operasi Tahun 2015-2019	160
Lampiran 9 Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan Tahun 2015-2019	161
Lampiran 10 Hasil Perhitungan Umur Perusahaan Tahun 2015-2019	162
Lampiran 11 Hasil Perhitungan Sustainable Finance Tahun 2015-2019.....	163
Lampiran 12 Perhitungan Item Sustainable Finance Tahun 2015-2019.....	164
Lampiran 13 Hasil Perbandingan Seluruh Item Per Tahun 2015-2019.....	196

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di era global dan domestik saat ini telah menggemparkan perubahan pesat dalam bidang sosial, politik, budaya dan ekonomi. Perubahan kondisi tersebut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara ASEAN termasuk di negara Indonesia pada sektor keuangan (perbankan). Kondisi perbankan ini dapat menggerakkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk melakukan penilaian atas kesehatan bank guna mengetahui keberlanjutan bank dimasa yang akan datang.

Perekonomian selalu menjadi perhatian paling penting dikarenakan perekonomian yang tidak stabil (naik-turun) akan muncul masalah-masalah ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi rendah, naiknya harga barang import, demand tinggi suplay rendah dan ongkos produksi naik yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi. Inflasi merupakan naiknya seluruh harga dan berlangsung terus menerus selama periode waktu tertentu. Salah satu faktor agar tingkat inflasi tetap stabil adalah menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate mencapai 5,5% guna untuk mengimplementasikan tingkat suku bunga seperti tabungan, kredit dan deposito. Pada saat level BI 7-Day RR naik maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan jumlah uang

yang beredar berkurang. Pada suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan merangsang para pelaku usaha untuk mengurangi investasinya karena biaya modal semakin tinggi. Hal ini dapat meredam aktivitas ekonomi dan pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi yang tinggi.

Perbankan memiliki peranan penting sebagai lembaga keuangan di Indonesia yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, deposito dan tabungan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Perbankan merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat dari sisi sektor keuangan. Menurut Undang-Undang RI no 10 tahun 1998, Bank adalah “badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau badan-badan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Bank Indonesia keadaan perbankan saat ini mengalami pasang surut karena lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* di bank tersebut yang akibatnya masih maraknya pembobolan dana atau praktik kecurangan (Fraud). Lemahnya penerapan GCG inilah memicu terjadinya berbagai masalah keuangan pada bisnis perusahaan. Kelemahan tersebut antara lain minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen serta kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang adil. Perusahaan perbankan harus meningkatkan kinerja keuangan dan kesehatan bank dari waktu ke waktu. Salah satu cara untuk mengurangi

konflik kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan adalah dibentuknya mekanisme good corporate governance dalam pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian *sustainable finance* di perbankan. Mekanisme GCG diukur dengan menggunakan faktor internal meliputi ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit. Hasil penelitian Ani dan Fredy (2017:441) bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainable finance* sedangkan ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance*. Sebaliknya hasil penelitian oleh Rahayu (2019:31) menyatakan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainable finance*.

Stakeholder (pemangku kepentingan) merupakan suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi (Hamdani, 2018:34). Hubungan perusahaan dengan stakeholder mengalami perubahan seiring berjalanya waktu. Hubungan stakeholder dengan perusahaan saat ini bersifat interaktif, hubungan interaktif ini dapat membantu perusahaan mempelajari ekspektasi masyarakat, memperoleh keahlian dari luar perusahaan serta mengembangkan solusi kreatif.

Industri perbankan yang memiliki arus kas yang optimal akan tercapainya kondisi yang likuiditas. Salah satu unsur likuiditas adalah ketersediaan arus kas operasi yang berpengaruh pada kinerja perusahaan. arus kas operasi berpengaruh terhadap laba suatu perusahaan agar dapat

mempertahankan kelangsungan dan perkembangan bisnis perusahaan. Permasalahan arus kas pada perbankan yang terdaftar di BEI yaitu Bank BJBR, mengalami defisit pada laporan arus kas dari aktivitas operasinya mencapai Rp 6,07 triliun, disebabkan karena menurunnya aset operasi perseroan dan menurunnya liabilitas operasi. Perbankan yang mengalami defisit akan menimbulkan kegoncangan pada perekonomian negara seperti tingginya tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan pengangguran.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklarifikasikan besar atau kecilnya perusahaan antara lain dengan indikator total aset, total penjualan dan nilai pasar saham (Herry, 2017:3). Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *sustainability financial ratio*. Dari hasil penelitian (Ani dan Fredy, 2017:445) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainable finance* namun belum semua penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainable finance*.

Dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya menerbitkan agenda baru yaitu *sustainable finance* yang roadmapnya telah diresmikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Republik Indonesia pada tanggal 5 Desember 2014 lalu (www.antaranews.com). Roadmap keuangan berkelanjutan meliputi sektor keuangan termasuk perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank (asuransi, leasing, pegadaian dan dana pensiun). *Sustainable Finance* (keuangan berkelanjutan) merupakan dukungan menyeluruh dari

industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan untuk kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup (OJK, 2014).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan International Finance telah menetapkan dua fase program pengembangan keuangan berkelanjutan sesuai aturan-aturan *sustainable finance*. Fase pertama periode 2015-2019, Peraturan OJK (POJK) nomor 51 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Green Bond, pengembangan sistem informasi keuangan berkelanjutan, program kepedulian dan pelatihan penguatan sumber daya manusia lembaga jasa keuangan dan fase kedua periode 2015-2024, POJK nomor 60 tahun 2017 tentang pengawasan dan keunggulan implementasi manajemen risiko lingkungan hidup, sosial dan tata kelola lembaga jasa keuangan, mengembangkan dan berinovasi dalam produk jasa keuangan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) serta Paris Agreement di bidang perubahan iklim. Otoritas meminta perbankan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yaitu prinsip yang didasarkan pada berkembangnya produk, kapasitas internal perbankan, organisasi, manajemen risiko tata kelola, dan standar prosedur operasional sesuai keadaan masyarakat dan lingkungan.

Dalam masa 10 tahun terakhir ini, pembangunan yang semata-mata menargetkan pertumbuhan ekonomi telah mendapati berbagai isu terutama isu penurunan kualitas lingkungan yang kurang baik dan kurang optimal, maraknya isu kesenjangan sosial dan isu perubahan iklim dengan segala

implikasinya. Dampak-dampak negatif yang datang dari proses pembangunan ekonomi mendorong diterapkannya pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan dari berbagai aspek ekonomi (*profit*), aspek sosial (*people*) dan aspek lingkungan (*planet*) (OJK, 2014)

Program keuangan berkelanjutan tidak hanya untuk meningkatkan tanggung jawab pembiayaan pada sektor-sektor utama yang memiliki multiplier effect yang tinggi seperti sektor energi, sektor infrastruktur, sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan UMKM. Pendanaan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect yang besar dapat mendorong kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

Isi rencana pemaparan rencana program kerja keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) pada lembaga jasa keuangan meliputi perbankan, pasar modal dan IKNB (Industri Keuangan Non Bank). Roadmap *sustainable finance* pada sektor perbankan memiliki beberapa tujuan arah pembangunan yaitu untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing di dunia lembaga perbankan nasional maupun internasional, untuk menggerakkan modal dalam meningkatkan efektivitas sistem keuangan dan menguatkan keuangan hijau pada perbankan sehingga tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Panjang periode tahun 2015-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek periode tahun 2015-2019, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sektor perbankan dan industri jasa keuangan lainnya terhadap *sustainable finance*.

Ada delapan lembaga jasa keuangan perbankan yang telah menerapkan green banking pilot project *sustainable finance* dalam roadmap keuangan berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diresmikan pada Desember 2014. Delapan bank tersebut yang menerapkan sustainable finance antara lain PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, PT Bank artha Graha Internasional Tbk, PT Bank BRI Syariah Tbk, PT BPD Jabar-Banten Tbk, PT Bank Muamalat Tbk .

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dan sampel yang digunakan, serta rentang waktu yang dijadikan objek penelitian. Berdasarkan perbedaan dalam penelitian terdahulu, masih minimnya penelitian terhadap *sustainable finance* di Indonesia. Penerapan *sustainable finance* pada jasa keuangan khususnya sektor perbankan masih belum optimal dan hanya sebagian perbankan yang menerapkannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Dewan Direksi berdampak terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
2. Apakah Proporsi Komisaris Independen berdampak terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
3. Apakah Ukuran Komite Audit berdampak terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
4. Apakah Tekanan Stakeholder berdampak terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
5. Apakah Arus Kas Operasi berdampak terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
6. Apakah Ukuran Perusahaan berdampak terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
7. Apakah Umur Perusahaan berdampak terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
8. Apakah Ukuran Dewan Direksi , Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit , Tekanan Stakeholder, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan berdampak terhadap

Sustainable Finance pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dampak Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- b. Untuk menganalisis dampak Proporsi Komisaris Independen terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- c. Untuk menganalisis dampak Ukuran Komite Audit terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- d. Untuk menganalisis dampak Tekanan Stakeholder terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- e. Untuk menganalisis dampak Arus Kas Operasi terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- f. Untuk menganalisis dampak Ukuran Perusahaan terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

- g. Untuk menganalisis dampak Umur Perusahaan terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- h. Untuk menganalisis dampak Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Tekanan Stakeholder, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang dampak Mekanisme Governance, Tekanan Stakeholder, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap *Sustainable Finance*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai sasaran untuk mengaplikasikan teori yang diterima selama dibangku perkuliahan dengan kasus-kasus nyata.

- b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan

- c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan informasi sistem keuangan perusahaan dan investasi masa depan masyarakat dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

- d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan pada proses demokrasi yang transparan dan bertanggungjawab khususnya pada masyarakat dalam program keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sustainable Finance

a. Pengertian Sustainable Finance

Pada dasarnya *sustainable finance* merupakan suatu konsep dalam tujuan untuk pertumbuhan, kemajuan dan pembangunan berkelanjutan di berbagai negara yang masih terbatas perekonomiannya yang mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. *Sustainable finance* merupakan implementasi pengelolaan kredit/pemberian pembiayaan serta investasi pada seluruh faktor industri jasa keuangan dengan memasukkan faktor risiko ekonomi, sosial dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, kebijakan tersebut sudah menjadi bagian dari portofolio industri jasa keuangan yang bersangkutan (Jensen & Meckling, 1976:101). Sustainable finance (keuangan berkelanjutan) merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup (OJK, 2014:438). *Sustainable finance* merupakan sebuah tantangan dan peluang baru dimana Lembaga Jasa Keuangan (LJK) memanfaatkan untuk tumbuh dan berkembang dengan stabil (Simamora, 2019:33) Dapat ditarik

kesimpulannya bahwa *sustainable finance* merupakan pembiayaan berkelanjutan dari industri jasa keuangan yang diterapkan di sektor perbankan untuk menerapkan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dengan mementingkan tiga aspek.

Terdapat tiga tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai secara simultan dengan tiga pilar (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup sesuai dengan kondisi dan tingkat kemajuan masyarakat (Munasinghe, M.,1992:55) antara lain:

- 1) Ekonomi (*profit*) : pertumbuhan ekonomi, peningkatan output, pembentukan modal dan peningkatan daya saing.
 - 2) Sosial budaya (*people*) : kesejahteraan sosial, pemerataan, kenyamanan dan ketentraman.
 - 3) Lingkungan hidup (*planet*) : pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan, mengurangi dampak eksternalitas negatif dan mendorong dampak eksternalitas positif dalam proses kegiatan pembangunan.
- b. Tujuan Implementasi Keuangan Berkelanjutan Antara Lain :
- 1) Untuk meningkatkan daya tahan dalam kemampuan pengambilan manajemen risiko yang baik, daya saing Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk berinovasi produk atau pelayanan lingkungan ramah lingkungan sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

- 2) Untuk menyediakan sumber kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu pada RPJP tahun 2015-2024 dan RPJM tahun 2015-2019 yang bercirikan *pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment*.
- 3) Untuk berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan global warming melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan atau mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

c. Prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan :

- 1) Prinsip Pengelolaan Risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial dalam manajemen risiko IJK yang berguna meminimalisir dampak negatif yang timbul, mencegah dan menghindari, serta mendorong peningkatan pemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional IJK.
- 2) Prinsip pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas berkelanjutan bersifat inklusif untuk meningkatkan program pendanaan terutama sektor industri, energi, pertanian, infrastruktur dan UMKM dengan menyeimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan.
- 3) Prinsip tata kelola pada aspek lingkungan hidup dan tanggungjawab sosial (CSR) meliputi pelaporan berkelanjutan yang kokoh dan transparan dalam kegiatan operasional IJK.

- 4) Prinsip prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif untuk menciptakan sinergi kemajuan dalam implementasi keuangan berkelanjutan serta mengembangkan kapasitas SDM, teknologi informasi dan menjalin kerjasama antara IJK, regulator, pemerintah, lembaga domestik maupun lembaga internasional.

d. Strategi Program Roadmap Keuangan Berkelanjutan

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (2015-2019)

Program yang memfokuskan pada peletakan kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan, peningkatan pemahaman, pengetahuan serta kompetensi sumber daya manusia pelaku dari IJK, pemberian insentif/tunjangan dan koordinasi dengan instansi yang terkait.

- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2015-2024)

Program yang memfokuskan pada integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan berkelanjutan terhadap kebijakan yang *pro growth, pro poor dan pro job* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang maju dan tinggi, inklusif serta berkelanjutan.

e. Strategi Utama Sustainable Finance :

Pembangunan berkelanjutan yang mengimplementasikan pada industri jasa keuangan telah diwujudkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan (*sustainable Finance*) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mengembangkan strategi utamanya meliputi:

- 1) Peningkatan penawaran (*supply*) keuangan berkelanjutan untuk pembiayaan ramah lingkungan yang berasal dari energi baru terbarukan dan konservasi energi
- 2) Menciptakan permintaan (*demand*) atas keuangan berkelanjutan produk keuangan ramah lingkungan.
- 3) Upaya pengawasan dan penerapan implementasi keuangan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

f. Peran Sustainable Finance dalam Dunia Perbankan

Kemunculan sustainable finance di dunia perbankan sudah cukup lama sejak awal di resmikan oleh OJK tahun 2014. Program roadmap *sustainable finance* yang disahkan bertujuan menjadi instrumen bergerak untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, lingkungan dan sosial serta meningkatnya persaingan perusahaan jasa keuangan di Indonesia. perbankan memiliki peran sangat penting dalam membantu kelancaran pembangunan nasional. Hal tersebut dicerminkan melalui alokasi penyaluran kredit/pemberian pembiayaan pada setiap sektor-sektor penunjang pembangunan.

2. Mekanisme Good Corporate Governance

Pada dasarnya *corporate governance* merupakan suatu sistem dan proses yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan perusahaan antara berbagai pihak (internal maupun eksternal) demi tercapainya tujuan organisasi serta meningkatkan keberhasilan usaha sesuai prinsip GCG. GCG merupakan salah satu bentuk dari implementasi bisnis beretika (Soemarso, 2018:225). Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan struktur oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan, sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (OECD, 2003:35). GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan baik jangka pendek atau jangka panjang dan memenangkan persaingan bisnis global (Daniri, 2005:1). Tujuan dari GCG merupakan mengatur hubungan antar perusahaan dan mencegah serta memperbaiki secepatnya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan. salah satu kunci sukses suatu perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang dan memenangkan persaingan bisnis global perusahaan yang menerapkan GCG. Dalam meningkatkan kinerja bank, melindungi *stakeholders*, nilai-nilai etika pada industri perbankan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian, perbankan

memiliki posisi sebagai perantara (*financial intermediary*) antara satu kesatuan (entitas) di dalam pasar dan bank memiliki beberapa fungsi dalam merubah rupa uang dengan memperhatikan besarnya, lamanya, tempatnya, serta risikonya.

a. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Industri Perbankan

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari GCG yaitu :

- 1) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak para *stakeholder* (pemangku kepentingan) termasuk pemasok, pelanggan, pemegang saham, investor dan masyarakat luas yang muncul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku.
- 2) *Transparency* (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, keterbukaan, pengungkapan dalam mengemukakan informasi riil yang bersangkutan mengenai perusahaan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat, jelas, cepat, akurat dan mudah diakses oleh stakeholder bahkan masyarakat.
- 3) *Accountability* (akuntabilitas) yaitu proses fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban seluruh pelaporan perusahaan secara transparan, benar, terukur untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan efektif.

- 4) *Independency* (kemandirian) yaitu suatu situasi dan kondisi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa saling berkuasa, tidak melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lainnya dan bebas dari segala pengaruh atau tekanan kepentingan tertentu.
- 5) *Reponsibility* (tanggungjawab) yaitu kepatuhan untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan, prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan melaksanakan tanggungjawab (kepedulian) pada masyarakat dan lingkungan.

b. Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia

Implementasi GCG di Indonesia sampai saat ini masih rendah dalam memenuhi harapan semua pihak dan masih menghadapi kendala yang luar biasa dalam tata kelola yang baik. Penyebab GCG belum berjalan secara optimal dikarenakan belum profesionalnya pengelolaan perusahaan, adanya ketidaksimetrisan informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, lemahnya proteksi hukum bagi para pemegang saham, score/rating keterbukaan yang rendah. Dengan harapan pelaksanaan GCG kedepan dapat berjalan secara efektif dan mempunyai score/rating tinggi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

c. Penerapan GCG pada Perbankan di Indonesia

krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 telah menyebabkan reformasi dan munculnya berbagai cara untuk memperkuat ekonomi nasional dan kerjasama regional di bidang tata kelola perusahaan dikawasan ASEAN tahun 2015. Di tengah krisinya keuangan di Indonesia saat itu, pasar modal sangat penting bagi Perekonomian Nasional. Pasar modal menyediakan alternatif pembiayaan perusahaan jangka panjang dan sarana investasi bagi para investor. Secara mikro, bank berfungsi menyalurkan dana pada pelaku usaha dan perorangan yang membutuhkan dana untuk memperlancar usaha dari pihak-pihak yang berkepentingan. Secara makro, industri perbankan berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi perkembangan perekonomian dan sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter (KNKG, 2012:186). Dalam undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan secara umum diatur ketentuan yang terkait dengan GCG baik yang termasuk *governance structure*, *governance proses* dan *governance outcome*.

Mekanisme tata kelola perusahaan menjelaskan bagaimana lembaga atau institusi tercakup dalam struktur organisasi secara integrasi dalam menjalankan fungsinya masing-masing (Soemarso, 2018:238). Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran GCG antara lain ukuran dewan direksi, komisaris independen dan komite audit yang mempunyai pengaruh baik atau

tidaknya kinerja keuangan di suatu perusahaan. Indikator mekanisme GCG yang sudah dirancang dapat tercapai keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang bersangkutan di dalam perusahaan. Pemantauan sistem mekanisme dalam rangka mewujudkan penerapan good corporate governance dengan baik di pengaruhi oleh (Hamdani , 2018:86) :

1) Dewan Direksi

Dewan direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan tanggung jawab penuh secara kolegal dalam mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan visi dan misinya agar berjalan secara efektif. Dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian inter bank, industri perbankan juga memiliki regulasi yang ketat dibanding industri lainnya sehingga memerlukan dewan, baik dewan direksi maupun dewan komisaris karena memiliki skill dan latar belakang yang berbeda-beda agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan dengan efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

- a) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik, tepat, cepat, akurat dan bertindak independen.

- b) Direksi harus profesional yakni berintegritas dan mempunyai pengalaman serta kelincahan untuk menjalankan tugasnya.
- c) Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitabilitas) dan berkelanjutan.
- d) Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang susah di tetapkan.

2) Komisaris Independen

Dalam proporsi ukuran dewan komisaris terdapat komisaris independen yang merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan dewan komisaris lainnya, direksi, pemegang saham pengendali atau lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Surat keputusan PT Bursa Efek Jakarta Nomor. Kep-315/BEJ06-2000 mewajibkan suatu perusahaan untuk memiliki dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta memantau perusahaan dalam melaksanakan GCG di Indonesia. komisaris independen adalah pihak yang tidak

terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan anggota dewan komisaris lainnya (Soemarso, 2018: 287).

Kriteria yang harus dimiliki oleh komisaris independen menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* sebagai berikut :

- a) Komisaris independen bukan anggota manajemen
- b) Komisaris independen bukan pemegang saham mayoritas atau berhubungan secara langsung atau tidak dengan pemegang saham mayoritas perusahaan
- c) Komisaris independen tidak memiliki hubungan kontaktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup
- d) Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan keahliannya sebagai seorang komisaris

3) Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang bertugas membantu dewan komisaris untuk melakukan penelitian dan pengawasan proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit juga sebagai penghubung antara pemegang saham dengan dewan komisaris dalam

menangani masalah pengelolaan perusahaan. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektifitas pengambilan keputusan (Hamdani, 2016:93).

Tugas komite audit dalam membantu dewan komisaris sebagai berikut :

- a) Memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan transparan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku
- b) Memastikan struktur internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
- c) Memastikan pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilakukan sesuai standar audit yang ditetapkan
- d) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan

3. Tekanan Stakeholder

Konsep manajemen strategis yang membantu perusahaan atau badan usaha yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar pihak internal maupun eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif merupakan teori *stakeholder*. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan seseorang, kelompok atau organisasi yang memiliki ketertarikan atau kepentingan dalam organisasi tertentu (Rudyanto dan Siregar, 2018). *Stakeholder* merupakan bagian penting bagi perusahaan,

tanpa adanya stakeholder suatu perusahaan tidak dapat beroperasi (Suharyani et al, 2019:77). merupakan suatu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi maupun di pengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi (Hamdani, 2018:34). Penelitian tentang pengaruh tekanan *stakeholder* dan *corporate governance* terhadap *sustainability report* hanya menunjukkan dampaknya terhadap kuantitas bukan kualitas. Pada perkembangan saat ini, perusahaan atau organisasi yang beroperasi tidak hanya berdiri sendiri melainkan membutuhkan para pemangku kepentingan, pengaruh adanya tekanan stakeholder bagi perusahaan membawa dampak positif karena tanpa adanya dukungan dari stakeholder perusahaan tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik dan lancar.

Tekanan *stakeholder* terhadap perusahaan secara aktif dan efektif melakukan berbagai kegiatan lingkungan bahkan kewajiban perusahaan untuk melaporkan keuangannya secara transparan, akurat dan tepat waktu. Maka tanggung jawab suatu perusahaan tidak hanya terpacu pada kinerja keuangan saja melainkan juga bertanggungjawab terhadap permasalahan sosial yang timbul oleh aktivitas operasional perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, perusahaan mempertimbangkan kepentingan para *stakeholder* karena adanya komitmen moral dari manajemen perusahaan, komitmen moral ini akan mendorong perusahaan untuk merumuskan strategi perusahaan (mementingkan kepentingan para *stakeholder*) dimana strategi

perusahaan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan kedepannya.

Tanggung jawab perusahaan yang semula fokus pada ekonomi laporan keuangan, telah bergeser dan lebih memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap stakeholder. Untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan hidup perusahaan dengan baik, maka perusahaan sangat bergantung pada dukungan dari *stakeholder*. Semakin powerfull dukungan stakeholder, maka akan semakin besar perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Galbreath (2006:35) membagi *stakeholder* dalam dua kelompok yaitu *internal primary stakeholders* dan *eksternal primary stakeholders*. Dalam penelitian ini pengukuran tekanan *stakeholder* diproksikan berdasarkan primary stakeholder yaitu lingkungan, konsumen, investor, dan karyawan.

a. Industri Tekanan Lingkungan

Perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan memberikan penilaian dari kelompok pecinta lingkungan dan masyarakat. Hal ini adanya kolaborasi antara insentif dengan lingkungan, pemegang saham lebih peka dan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan sekitar, maka semakin signifikan laporan tentang lingkungan perusahaan tersebut dan berdasarkan aspek kategori lingkungan yang tertera dalam laporan keuangan berkelanjutan perusahaan. Lingkungan mengungkapkan laporan yang berkualitas, hal ini tidak lepas dari masyarakat dan lingkungan

perusahaan yang menuntut perusahaan agar dapat memperbaiki lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasional perusahaan sehingga perusahaan melakukan tanggungjawab sosial dan pengungkapan yang lebih transparan.

b. Industri Tekanan Konsumen

Memberi penilaian terhadap perusahaan dengan barang yang dikonsumsi oleh konsumen lebih diperhatikan dibandingkan perusahaan yang memproduksi barang produksi (Astrid, 2017:115). Hal ini menyebabkan perusahaan harus memperhatikan tindakanya, beroperasi sesuai kebutuhan para konsumen dan penilaian berdasarkan aspek kategori sosial diantaranya kesehatan, keselamatan pelanggan dan privasi pelanggan.

c. Industri Tekanan Investor

Industri dengan investor membuat perusahaan lebih transparan dan akurat dalam kualitas pelaporan keuangannya. Perusahaan yang memiliki tekanan investor tinggi maka akan menghasilkan tingkat keuangan berkelanjutan yang baik karena mengidikasi adanya tekanan dari pasar modal untuk meningkatkan penanaman modal oleh investor. Pasar modal merupakan pasar dengan syarat keterbukaan informasi bagian penting dari perlindungan investor untuk kepentingan publik sehingga perlindungan kepada investor banyak diatur oleh regulasi, kode etik atau standar profesi (Soemarso, 2018:154).

d. Industri Tekanan Karyawan

Karyawan merupakan aset bagi perusahaan. Karyawan yang berkualitas telah mengerti arti pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan. Kehilangan karyawan yang berkualitas dan produktif akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan sehingga perusahaan harus melakukan tuntutan untuk melaporkan tanggungjawab sosial perusahaan dari indikator mengenai karyawan atau pekerja.

4. Arus Kas Operasi (AKO)

Arus kas (cash flow) adalah arus masuk (*inflow*) dan arus keluar (*cash flow*) kas dan setara kas (Prastowo, 11:30). Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan mengklasifikasikan arus kas menurut golongannya. penggolongan arus kas meliputi arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan. Arus kas operasi yang berasal dari operasi perusahaan merupakan dana yang mendukung operasi perusahaan dalam mencapai laba setinggi-tingginya dan informasi laba untuk menentukan atau menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa datang. Subramanyam (2013:70) menyatakan arus kas yang paling penting dari sebuah perusahaan yakni berkaitan dengan kegiatan operasi.

Aktivitas operasi (*operating activites*) adalah penghasilan utama pendapatan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup semua efek kas dari setiap transaksi yang merupakan komponen

penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dagangan, pembayaran kas pembelian bahan pada supplier dan pembayaran gaji karyawan perusahaan. pelaporan arus kas operasi meliputi transaksi yang tergolong sebagai penentu besar kecilnya laba atau rugi. Terdapat dua perolehan yang didapat oleh perusahaan dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk antara lain hasil penjualan barang atau jasa, pendapatan bunga, dividen dan penjualan sekuritas yang diperdagangkan sedangkan arus kas keluar antara lain pembayaran membeli barang dagang, membayar gaji/upah, beban pajak, bunga, beban utilitas, biaya sewa, dan pembelian sekuritas yang diperdagangkan (Hery, 2016:119).

5. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Solichah, 2015:11). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklarifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain (Prasetyorini, 2013:11). Ukuran perusahaan adalah skala yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan (Herry, 2017:97).

Pada dasarnya ukuran perusahaan terdiri dari tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), perusahaan kecil (*small firm*). Perusahaan yang besar dan kuat mempunyai daya tarik tersendiri bagi para konsumen maupun investor

yang akan menanamkan modalnya karena perusahaan yang besar memiliki tingkat risiko kebangkrutan atau kerugian yang lebih kecil sebab jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan cukup besar. Adanya situasi yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan, situasi tersebut merupakan kemampuan perusahaan dalam menanggung berbagai risiko yang mungkin timbul. Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya yang banyak untuk meningkatkan nilai perusahaan karena mempunyai akses yang sangat baik terhadap sumber-sumber pendanaan dari eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil.

6. Umur Perusahaan (*Firm Age*)

Umur perusahaan merupakan tempo yang sudah dicapai perusahaan sejak awal berdiri hingga tempo yang tak terhingga (Cardilla et al, 2011:72). Menurut Utami (2011:108) menyatakan bahwa umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan. Umur perusahaan yang semakin tua dan semakin berjaya dapat menunjukkan bahwa perusahaan mampu bersaing dan tetap bertahan. Umur perusahaan diperkirakan memiliki hubungan positif terhadap *sustainable finance*. Semakin lama perusahaan maka akan semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua cenderung lebih terampil dalam pengumpulan, pemrosesan dan menghasilkan informasi akurat karena perusahaan telah mempunyai pengalaman yang cukup, dengan demikian laporan keuangannya akan lebih tepat waktu.

Selain itu perusahaan telah memiliki banyak pengalaman mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan pengolahan informasi dan cara mengatasinya (Wijayanti, 2009:148).

B. Studi Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Januar Santoso (2011) dengan judul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Financial Sustainability Ratio (Studi Empiris Pada Bank Umum Swasta Nasional dan Nasional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya perbedaan hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian. Ada dua perbedaan yaitu secara simultan, CAR, NPL dan LDR berpengaruh terhadap *Financial Sustainability Ratio* sedangkan secara parsial, NPL tidak berpengaruh terhadap *Financial Sustainability Ratio*. Pada penelitian ini menggunakan rasio keuangan berkelanjutan (*Financial Sustainable Ratio*) untuk menguji model konsistensi kinerja keuangan sektor perbankan. Pada variabel CAR peneliti menguji dengan tolak ukur ukuran perusahaan karena bank harus mengoptimalkan dan mengembangkan modalnya dengan menaikkan tingkat labanya sehingga bank tetap bertahan dengan baik terhadap kinerja keuangan bank.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Marsono (2013) dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report” melakukan

penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 memperoleh hasil bahwa profitabilitas, komite audit, dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil lain dalam penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas, *leverage*, tingkat aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aniktia dan Khafid (2015) dengan judul “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*” melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013 dengan hasil penelitian komite audit, governance commite dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Rianasari dan Irene Rini Demi Pangestuti (2016) dengan judul “Analisis Ratio Kinerja Keuangan Terhadap Financial Sustainability Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah Periode 2010-2014”. Hasil penelitian ini mengetahui informasi tentang keberlanjutan dan tingkat pertumbuhan bank dalam jangka panjang dengan menggunakan rasio FSR (Financial Sustainability Ratio). FSR dalam kota/kabupaten di Jawa Tengah periode 2010-2014 mengalami kondisi penurunan dan pengaruh ROA

(*Return On Assets*) berpengaruh positif terhadap FSR. Bank size memiliki pengaruh positif terhadap FSR serta bank age memiliki pengaruh positif terhadap FSR.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Salis Musta dan Hotman Fredy (2017) dengan judul “Mekanisme Governance dan Pengungkapan Sustainable Finance : Untuk Melihat Tingkat Kesiapan Penerapan Sustainable Finance Pada Perusahaan Jasa Keuangan terdaftar di BEI”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran direksi dan *size* terbukti mempengaruhi pengungkapan *sustainable finance* dan pengukuran dengan item berdasarkan IFC (*International Finance Corportion*) dalam komponen *sustainable finance* menghasilkan rata-rata sebesar 0,35. Mekanisme governance dengan ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *sustainable finance* serta *size* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainable finance*.
6. Penelitian yang dilakuka oleh Diono dan Prabowo (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Sustainability Report” yang mengambil sampel seluruh perusahaan di BEI yang melaporkan sustainability report tahun 2013-2015 membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan komisaris wanita dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sustainability report. Penelitian oleh Diono dan Prabowo (2017) juga

diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sustainability report.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Saur Costanius Simamora (2019) dengan judul “Implementasi Pelaporan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) di PT. Bank Negara Indonesia Tbk tahun 2015-2017”. Hasil yang diperoleh yaitu hasil analisa perbandingan dan trend kinerja keuangan pada PT BNI Tbk yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, meneliti indikator jumlah akun customer funding dan lending, dividen, penyaluran program kemitraan dan penyaluran bina lingkungan mengalami kenaikan. Aspek sosial, indikator penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak 2007, skor employee engagement, pegawai terlatih mengalami penurunan, jumlah pengusaha mikro, kecil dan TKI. Sedangkan aspek lingkungan, indikator pengguna air, listrik, jumlah taman, luas taman, biaya penanaman pohon, pengurangan pemakaian kertas dan hemat energi dari program Earth hour mengalami peningkatan.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2019) dengan judul “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap *Sustainable Finance Disclosure* Pada Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017”. Hasil analisa menunjukkan bahwa dewan direksi, komite audit dan rapat dewan direksi terbukti berpengaruh terhadap sustainable finance disclosure sedangkan komisaris independen dan latar belakang

komisaris utama tidak berpengaruh berpengaruh terhadap *sustainable finance disclosure*.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Alat Analisis	Persamaan dan Perbedaan
1	Januar S dan Khoirunissa (2011)	Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Financial Sustainability Ratio (Studi Empiris Pada Bank Umum Swasta Nasional dan Nasional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)	Perbedaan secara simultan, CAR, NPL dan LDR berpengaruh terhadap <i>Financial Sustainability Ratio</i> sedangkan secara parsial, NPL tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Sustainability Ratio</i> .	Analisis regresi data panel	Persamaan : meneliti ukuran perusahaan terhadap <i>Financial Sustainable Ratio</i> Perbedaan : tidak menggunakan rasio CAR, NPL, LDR
2	Sari dan Marsono (2013)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report	Profitabilitas, komite audit, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report	Analisis regresi berganda	Persamaan : meneliti komite audit, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen dan dewan direksi Perbedaan : Tidak meneliti profitabilitas, likuiditas, leverage,

					tingkat aktivitas perusahaan
3	Aniktia dan Khafid (2015)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report	Komite audit, governance commite dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report	Regresi linier berganda dan analisis logistik	<p>Persamaan : Meneliti komite audit, dewan komisaris independen</p> <p>Perbedaan : Tidak meneliti governance commite, profitabilitas, leverage</p>
4	Septi R dan Irene R. D (2016)	Analisis Ratio Kinerja Keuangan Terhadap Financial Sustainability Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah Periode 2010-2014	Mengetahui informasi keberlanjutan dan tingkat pertumbuhan bank dalam jangka panjang dengan menggunakan rasio FSR, ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh	Regresi linier berganda	<p>Persamaan : meneliti tentang <i>sustainable finance</i>, ukuran perusahaan dan umur perusahaan</p> <p>Perbedaan: tidak menggunakan rasio kinerja keuangan</p>

			positif terhadap <i>sustainable finance</i>		untuk menghitung <i>sustainable finance</i>
5	Salis Musta dan Hotman Fredy (2017)	Mekanisme Governance: Untuk Melihat Tingkat Kesiapan Penerapan Sustainable Finance pada Perusahaan Jasa Keuangan Terdaftar di BEI	Ukuran direksi dan size mempengaruhi pengungkapan <i>sustainable finance</i> , mekanisme governance dengan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap <i>sustainable finance</i> .	Regresi linier berganda	<p>Persamaan : Size, ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen dalam pengungkapan <i>sustainable finance</i></p> <p>Perbedaan : Tidak menggunakan ukuran komite audit untuk mengukur tingkat mekanisme governance</p>
6	Diono dan Prabowo (2017)	Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Sustainability Report	Ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komisaris wanita. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sustainability report	Analisis regresi berganda	<p>Persamaan : Meneliti ukuran dewan komisaris independen, ukuran perusahaan</p> <p>Perbedaan : Tidak meneliti profitabilitas, ukuran dewan komisaris, komisaris wanita</p>

7	Saur C,S (2019)	Implementasi Pelaporan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) di PT Bank Negara Indonesia Tbk Tahun 2015-2017	Hasil analisa perbandingan dan trend kinerja keuangan pada PT BNI Tbk yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.	Analisis perbandingan, analisis trend	Persamaan : meneliti laporan keuangan berkelanjutan di perbankan Perbedaan : Tidak meneliti aspek ekonomi, sosial, dan aspek lingkungan
8	Rahayu (2019)	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Sustainable Finance Disclosure Pada Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017	Dewan direksi dan komite audit berpengaruh pada sustainable finance disclosure	Data panel, regresi linier berganda	Persamaan : Meneliti dewan direksi, komisaris independen dan komite audit Perbedaan : Tidak meneliti latar belakang pendidikan komisaris utama dan rapat dewan komisaris

C. Kerangka Pemikiran Konseptual

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Dampak Dari Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Tekanan *Stakeholder*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap *Sustainable Finance*. Berikut Penjelasanya :

1. Dampak Ukuran Dewan Direksi (X1) terhadap *Sustainable Finance* (Y)

Dewan direksi merupakan penentu dalam kebijakan dan tanggungjawab sebuah perusahaan dalam berbagai hal yang termasuk dalam penerapan sustainable finance dan pelaporan keuangan perusahaan (Soemarso, 2018:278). Dewan direksi memiliki peran yang penting di dalam perusahaan karena tanpa adanya pengelolaan dari dewan direksi, perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar. Ukuran dewan direksi yang besar dalam perusahaan akan saling mudah untuk berkerjasama dan adanya pertukaran ide yang luas dan solusi dalam mengatasi masalah sosial serta lingkungan. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan dalam bentuk laporan tahunan meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan pelaporan pelaksanaan GCG. Dapat disimpulkan dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap sustainable finance (Any dan Fredy, 2017:445).

2. Dampak Proporsi Komisaris Independen (X2) terhadap *Sustainable Finance* (Y)

Dewan komisaris merupakan pengawas dalam perusahaan yang bertugas mengawasi perilaku manajemen dalam pelaksanaan strategi perusahaan serta memastikan perusahaan telah menerapkan GCG (Hery, 2017:23). Komisaris independen merupakan organ perusahaan yang berada diluar perusahaan. Peran komisaris independen sangat penting dan cukup menentukan untuk keberhasilan implementasi GCG.

Proporsi dewan komisaris independen juga memberikan kontribusi yang efektif terhadap kualitas hasil penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Perusahaan yang semakin banyak proporsi komisaris independen maka akan semakin kecil potensi permasalahan di perusahaan serta diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2019:31) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *sustainable finance disclosure*.

3. Dampak Ukuran Komite Audit (X3) terhadap *Sustainable Finance* (Y)

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya yang bertanggungjawab terhadapnya salah satunya komite audit. Komite audit dapat meningkatkan peran pengawasannya pada proses pelaporan keuangan perusahaan, perancangan dan implementasi sistem pengendalian internal yang baik. Tugas utama komite audit adalah berkaitan dengan laporan keuangan, menelaah laporan keuangan yang disampaikan kepada publik sesuai atau tidaknya dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor VIII.G-II. Jumlah anggota komite audit minimal tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan dari piha luar perusahaan. Jika semakin banyak jumlah komite audit maka akan semakin maksimal dalam meningkatkan pengawasan dan pelaporan keuangan dan akutansi. Penelitian yang dilakukan oleh

Rahayu (2019:3) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *sustainable finance disclosure*.

4. Dampak Tekanan *Stakeholder* (X2) terhadap *Sustainable Finance* (Y)

Stakeholder (pemangku kepentingan) merupakan kewajiban dalam menjaga perusahaan agar tetap berjalan dengan lancar, dikelola dengan baik, penuh kehati-hatian dan penuh adanya tanggungjawab (Soemarso, 2018:565). Stakeholder dianggap penting karena sebagai tempat perusahaan atau manajemen dalam memproteksi demi keberlangsungan usaha perusahaan tersebut. Ada beberapa pihak yang terkait dengan stakeholder antara lain pemegang saham (*shareholder*), kreditur, karyawan, pemerintah, konsumen, pemasok, aktivis lingkungan dan masyarakat serta pesaing.

Tekanan oleh para stakeholder menuntut pengkomunikasian dan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk laporan dan perusahaan harus melakukan tuntutan karyawan. Kehilangan karyawan yang berkualitas menyebabkan perusahaan dapat terguncang operasionalnya karena aset yang paling penting bagi perusahaan bukan hanya aset yang dapat diukur dan dilihat akan tetapi aset yang tidak dapat diukur yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Dari penjelasan diatas berharap bahwa tekanan karyawan berpengaruh positif terhadap *sustainable finance*.

5. Dampak Arus Kas Operasi (X3) terhadap *Sustainable Finance* (Y)

Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan aktivitas operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi tanpa mengandalkan dari sumber-sumber arus kas lainnya. Kegiatan laporan arus kas operasi berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih (Soemarso, 2018:418). Laba bersih (net income) atau laba setelah pajak yang ditahan untuk dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham. Peningkatan arus kas operasi akan menunjukkan meningkatnya penghasilan suatu perusahaan sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya sehingga mempengaruhi permintaan saham di perusahaan tersebut. Rohmawati dan Suhikmat (2017:70) menyimpulkan dari hasil penelitiannya di PT Unilever Tbk bahwa terdapat hubungan antara arus kas operasi dengan laba operasi. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi berpengaruh positif terhadap *sustainable finance*.

6. Dampak Ukuran Perusahaan (X4) terhadap *Sustainable Finance* (Y)

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dinilai dari nilai total aset perusahaan (Hery, 2017:17). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan atau modal dari perusahaan

tersebut. Semakin besar aktiva yang diperoleh maka akan semakin besar modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka akan semakin banyak perputaran uang dan dikenal cepat oleh masyarakat. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami *go public*. Perusahaan dengan pertumbuhan yang besar akan mudah untuk memasuki pasar modal. Ukuran perusahaan mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah dalam memperoleh sumber-sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal (Prasetyorini, 2013:18). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan dapat berpengaruh positif terhadap *sustainable finance*.

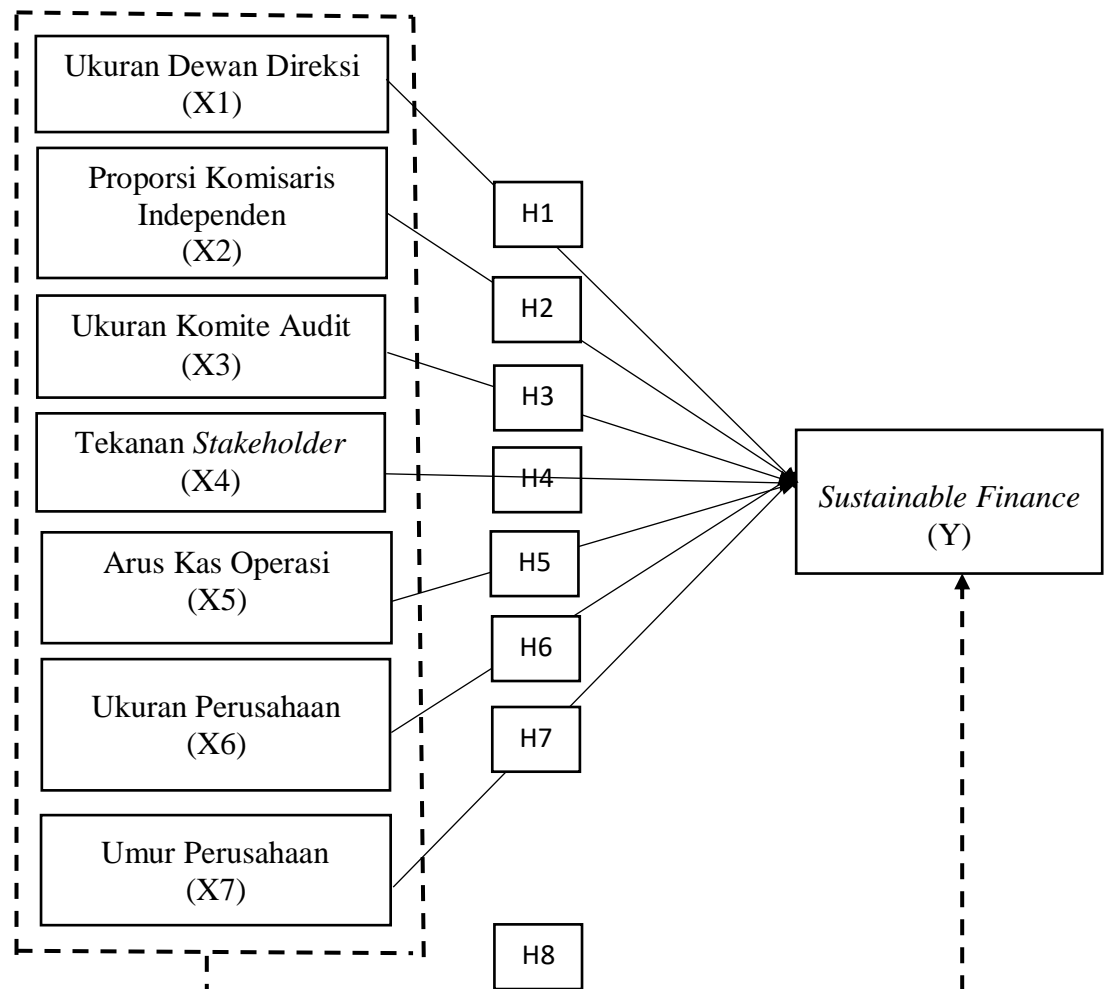
7. Dampak Umur Perusahaan (X5) terhadap *Sustainable Finance* (Y)

Umur perusahaan diartikan dengan seberapa lama perusahaan beroperasi, mulai awal berdiri sampai saat sekarang ini. Semakin lengkap informasi yang diperoleh tentang perusahaan tersebut, maka akan semakin menunjukkan kemampuan perusahaan dapat bertahan hidup dan banyaknya pengalaman yang ada. Perusahaan yang telah lama berdiri akan mempunyai pengelolaan informasi akuntansi lebih daripada perusahaan yang baru berdiri sehingga lebih tertarik untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaannya. Diasumsikan panjangnya umur perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan setiap risiko

dan tantangan yang ada, dapat menunjukkan eksistensinya dalam lingkungan bisnis serta mampu menjaga kepercayaan investor yang akan menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan dapat berpengaruh positif karena perusahaan yang sudah lama berdiri memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangannya, lebih mengerti secara detail informasi-informasi yang perlu diungkapkan untuk meningkatkan citra positif pada perusahaan dan memiliki kesadaran tidak bergantung kepada kemampuan laba saja untuk bertahan dalam usaha, namun menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel yang meliputi Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Tekanan *Stakeholder*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan yang diperkirakan berpengaruh secara parsial dan simultan dengan *Sustainable Finance* sebagai variabel terikat. Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, maka dibuat model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan model kerangka pemikiran diatas, maka perumusan hipotesisnya yaitu :

H1 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

H2 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

H3 : Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

H4 : Tekanan *Stakeholder* berpengaruh terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

H5 : Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

H6 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

H7 : Umur Perusahaan berpengaruh terhadap *sustainable Finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

H8 : Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Tekanan *Stakeholder*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap *sustainable finance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2016:7). Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan penelitian yang dapat melihat hubungan antara dua variabel atau lebih terhadap obyek yang diteliti bersifat sebab akibat atau saling mempengaruhi sehingga dalam penelitian ada variabel independen dan variabel dependen. Tujuan dari variabel ini untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yaitu Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Tekanan *Stakeholder*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap variabel dependen yaitu *Sustainable Finance*. Berdasarkan jenis data, penelitian kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan (Suliyanto, 2018:20).

B. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi tersebut (Sugiyono, 2016:215). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 yaitu sebanyak 42 perusahaan perbankan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *metode purposive sampling*. *Metode purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Suliyanto, 2018:226). Metode pemilihan sampel pada karakteristik populasi dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengambilan Sampel

No	Kriteria Sampel	Hasil
1	Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019	42
2	Perusahaan sektor perbankan yang mempublikasikan <i>annual report</i> tidak lengkap sesuai variabel yang diteliti tahun 2015-2019	(24)
3	Perusahaan sektor perbankan yang tidak lengkap mempublikasikan <i>sustainable report</i>	(10)
Total sampel		8

Sumber : Penulis yang diolah 2020

Tabel 1.2
Daftar Sampel Perbankan Tahun 2015-2019

No	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk
5	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
6	BNGA	PT Bank CIMB Niaga Tbk
7	BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
8	BNLI	Bank Permata Tbk

Sumber : Data sekunder yang diolah 2020

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah hasil dari pemikiran teori-teori ilmiah yang telah digunakan guna dapat menyusun suatu konsep sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Teori ini adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Neumen, 2000:52).

2. Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan suatu penjelasan mengenai cara dan informasi untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan untuk penelitian kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel penelitian yang digunakan ada 2 jenis yaitu :

a. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2016:39) variabel dependen disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen atau dapat disebut dengan variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sustainable finance disclosure* (SFD). *Sustainable finance disclosure* menggambarkan jumlah pengungkapan *sustainable report* atau CSR berdasarkan pedoman dari

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan termasuk perbankan berdasarkan *item* yang telah diisyaratkan oleh CSR Kategori *item* yang diisyaratkan antara lain :

- 1) Penjelasan strategi keberlanjutan.
- 2) Ikhtisar aspek kinerja keberlanjutan yang meliputi aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup.
- 3) Profil lembaga jasa keuangan.
- 4) Penjelasan dewan direksi mengenai kebijakan untuk merespon tantangan strategi keberlanjutan, penerapan *sustainable finance*, dan strategi pencapaian target *sustainable finance*.
- 5) Tata kelola keberlanjutan yang memuat uraian tugas menjadi penanggungjawab dalam(direksi, komisaris, pegawai, pejabat, unit kerja) dalam penerapan *sustainable finance*, penjelasan mengenai pengembangan kompetensi oleh penanggung jawab penerapan *sustainable finance*, penjelasan prosedur yang dilakukan lembaga jasa keuangan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko terkait penerapan *sustainable finance*, penjelasan mengenai keterlibatan stakeholder dalam penilaian manajemen maupun keterlibatan dalam penerapan *sustainable finance*, serta

penjelasan mengenai masalah yang dihadapi oleh lembaga jasa keuangan dalam penerapan *sustainable finance*.

- 6) Kinerja keberlanjutan Kinerja keberlanjutan yang memuat penjelasan kegiatan dalam membangun budaya keberlanjutan, perbandingan kinerja ekonomi dan kinerja sosial yang berkaitan dengan penerapan *sustainable finance* selama 5 tahun, penjelasan kinerja lingkungan hidup yang terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk lingkungan hidup, penjelasan mengenai penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan, usaha konservasi keanekaragaman hayati, upaya pengurangan emisi dan limbah, maupun penyelesaian pengaduan masyarakat mengenai lingkungan hidup, serta tanggung jawab atas pengembangan produk dan jasa *sustainable finance*.

- 7) Verifikasi tertulis dari pihak independen

Jumlah item berdasarkan oleh CSR dari Pedoman Lembaga Jasa Keuangan terdiri dari 67 item pengungkapan. Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan item yang diungkapkan oleh perbankan (nilai 1 jika unsur diungkapkan serta nilai 0 jika unsur tidak diungkapkan) kemudian hasil dari penjumlahan item tersebut dibagi dengan total item yang diisyaratkan untuk diungkapkan. Maka pengukuran SFD

dapat dihitung dengan rumus menurut Rahayu (2019:41)

sebagai berikut :

$$SFD = \frac{\sum \text{Item yang diungkapkan}}{\text{Total item pengungkapan}}$$

b. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyanto (2016:39) variabel independen sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent atau dalam Bahasa Indonesia disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Sustainable Finance. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain :

1) Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan suatu organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dan mewakili, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Komposisi atau jumlah anggota direksi

harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan efektif dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dalam penelitian ini ukuran dewan direksi dapat diukur dengan menjumlahkan dewan direksi di setiap perusahaan. pengukuran dewan direksi menurut Any dan Fredy (2017:442) sebagai berikut:

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Dewan Direksi}$$

2) Proporsi Komisaris Independen

Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme *good corporate governance* yang diperlukan untuk mengurangi *agency problem* antara pemilik perusahaan dan manajer (Herry, 2017:41). Menurut Peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 33 tahun 2014 mensyaratkan jika jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka akan semakin kecil potensi terjadinya kesulitan keuangan, dimana pelaksanaan manajemen perusahaan lebih optimal dalam mendapatkan pengawasan oleh pihak komisaris independen. Pengukuran proporsi komisaris independen dalam penelitian ini yaitu membandingkan antarajumlah komisaris independen terhadap total keseluruhan dewan komisaris di perbankan

yang dirumuskan menurut Rahayu (2019:42) sebagai berikut:

$$KI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

3) Ukuran Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang membantu komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Keberadaan komite audit akan mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang transparan, akurat dan lengkap serta berintegritas yang tinggi. Anggota komite audit terdiri minimal tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten. Komite audit dalam penelitian ini dapat diukur dengan menjumlahkan komite audit di dalam perusahaan perbankan. Dapat dirumuskan menurut Rahayu (2019:42) sebagai berikut :

$$KA = \sum \text{Komite Audit}$$

4) Tekanan *Stakeholder*

Tekanan *stakeholder* istilah lainnya pemangku kepentingan dalam perusahaan atau organisasi. Tekanan *stakeholder* dapat berpengaruh signifikan bagi perusahaan karena tanpa *stakeholder*, perusahaan tidak akan berkembang dan maju. Hak-hak *stakeholder* di perusahaan

merupakan alat bagi *stakeholder* untuk memonitoring kegiatan perusahaan. Memonitoring ini untuk melindungi kepentingan stakeholder dan bermanfaat bagi perusahaan agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan keberlanjutannya.

Tekanan karyawan lebih dilindungi dan diperhatikan dibanding tekanan lainnya, karena karyawan merupakan salah satu modal perusahaan serta sumber daya untuk menggerakkan roda usaha (Soemarso, 2018:141). Bagi perusahaan perlindungan dan kesejahteraan karyawan diharapkan akan meningkatkan loyalitas, integritas, produktivitas sehingga dapat diamankan. Penelitian ini menggunakan jumlah dari seluruh karyawan yang ada di perbankan. menurut Alfaiz dan Aryati (2019:119) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$TK = Ln \sum \text{Karyawan}$$

5) Arus Kas Operasi

Arus kas operasi adalah arus kas yang bersumber dari aktivitas-aktivitas operasi termasuk biaya pemasok dan karyawan, kas dari pelanggan, pajak, deviden dan biaya bunga. Arus kas operasi sangat penting sebagai alat analitik untuk menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan. arus kas operasi dapat diukur berdasarkan saldo *operating*

cashflow di awal periode dibagi dengan seluruh total aset perusahaan perbankan yang sudah tersedia dalam laporan keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Cardilla et al (2016:73) arus kas operasi dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AKO = \frac{\text{Arus Kas Bersih Operasi}}{\text{Total Aset}}$$

6) Ukuran Perusahaan (*SIZE*)

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan (Hery, 2017:97). Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar (Sudarmadji dan Sularto, 2007:98). Investor akan lebih tertarik dan memperhatikan pada perusahaan dengan melihat ukuran dari suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin dikenal oleh masyarakat luas sehingga lebih mudah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan logartima natural total aset perusahaan perbankan. Maka ukuran perusahaan dapat diukur menurut Rianasari (2016:7) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Size} = \text{Ln Total Aset}$$

7) Umur Perusahaan (*AGE*)

Siklus hidup perusahaan memiliki suatu tujuan untuk menghasilkan finansial yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka yang panjang serta pembelajaran dan pertumbuhan suatu perusahaan diperlukanya *capitability* sistem informasi yang dapat memberikan informasi secara tepat waktu. Perusahaan yang sudah lama beroperasi dan sudah dikenal oleh masyarakat akan mengalami kejayaan. Umur perusahaan ditentukan dengan menggunakan jumlah umur perusahaan tersebut selama beroperasi. Artinya ketika perusahaan berkembang dan pekerja belajar dalam permasalahan yang ada didalam perusahaan sehingga dapat diminimalisirkan dengan baik. Umur perusahaan akan diukur dengan menggunakan jumlah umur suatu perusahaan perbankan dimulai dari awalnya beroperasi sampai saat ini. Menurut Rianasari (2016:7) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$AGE = \sum \text{Umur Perusahaan}$$

Tabel 3.3
Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Sumber
<i>Sustainable Finance Disclosure</i> (Y)	SFD	$SFD = \frac{\sum \text{Item yang diungkapkan}}{\text{Total item pengungkapan}}$	Rasio	Rahayu (2019:41)
Ukuran Dewan Direksi (X1)	DD	$DD = \sum \text{Dewan Direksi}$	Nominal	Any dan Fredy (2017:442)
Proporsi Komisaris Independen (X2)	KI	$KI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$	Rasio	Rahayu (2019:42)
Ukuran Komite Audit (X3)	KA	$KA = \sum \text{Komite Audit}$	Nominal	Rahayu (2019:42)
Tekanan Stakeholder (X4)	TK	$TK = \ln \sum \text{Karyawan}$	Nominal	Alfaiz dan Aryati (2019:119)
Arus Kas Operasi (X5)	AKO	$AKO = \frac{\text{Arus Kas Bersih Operasi}}{\text{Total Aset}}$	Rasio	Cardilla <i>et al</i> (2016:73)
Ukuran Perusahaan (X6)	SIZE	$\text{Size} = \ln \text{Total Aset}$	Nominal	Rianasari (2016:7)
Umur Perusahaan (X7)	AGE	$AGE = \sum \text{Umur Perusahaan}$	Nominal	Rianasari (2016:7)

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Segi setting, data dikumpulkan dalam setting ilmiah yang dapat berupa eksperimen, responden, seminar maupun diskusi. Sedangkan dalam segi sumbernya, data dibedakan dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi atau data kepada pengumpul data dan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (dokumen). Selanjutnya segi cara/teknik, pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, dan observasi (Sugiyono, 2016:137). Data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan mempelajari artikel, tesis, referensi, dan jurnal terdahulu mengenai literatur-literatur tentang topik yang akan dibahas sesuai dengan penelitian. Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data diperoleh dari www.idx.co.id dan data *Annual Report*. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kuantitatif. Alat ukur analisis yang digunakan adalah SPSS versi 22

E. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan diolah, selanjutnya dianalisis oleh program SPSS versi 22 dan menggunakan analisis data sebagai berikut :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Ghazali (2016:19) statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atau suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Bahwa uji t dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghazali, 2018:161). Jika suatu data tidak berdistribusi normal maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data yaitu dengan menggunakan uji statistik non-parametik. Kolmogorof Smirnov. Dalam hal ini untuk mengetahui berdistribusi normal

atau tidak. Residual yang normal jika nilai signifikan $> 0,05$, jika $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Multikolinieritas berarti model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel-variabel yang akan digunakan dalam persamaan regresi dengan menghitung nilai tolerance dan VIF (*Varian Information Factors*). Batas nilai tolerance adalah 0,10 dan VIF adalah 10. Apabila nilai nilai tolerance kurang dari 0,10 atau VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolonieritas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi adanya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedstisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah yang Homoskedstisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pada penelitian ini digunakan Uji Glejser untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresikan antara variabel independen nilai absolut residual. Jika nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka distribusi data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas. Tetapi sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansinya 5% (0,05) maka distribusi data dikatakan terkena heteroskedstisitas.

d) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Tabel 3.4
Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Nilai Statistik d	Hasil
$0 < d < d_l$	ada autokorelasi
$d_l < d < d_u$	tidak ada keputusan
$d_u < d < 4-d_u$	tidak ada autokorelasi
$4-d_u < d < 4-d_l$	tidak ada keputusan
$4-d_l < d < 4$	ada autokorelasi

Sumber : (Gozali, 2018:112)

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel Independen Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Tekanan *Stakeholder*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap variabel dependen *Sustainable Finance*.

Persamaan regresi linear berganda dapat dinyatakan sebagai berikut (Sugiyono, 2018:227) :

$$\text{SFD} = a + b_1 \text{DD} + b_2 \text{KI} + b_3 \text{KA} + b_4 \text{TK} + b_5 \text{AKO} + b_6 \text{SIZE} + b_7 \text{AGE} + e$$

Keterangan :

DD	: Ukuran Dewan Komisaris
KI	: Proporsi Komisaris Independen
KA	: Ukuran Komite Audit
TK	: Tekanan Karyawan

AKO	: Arus Kas Operasi
SIZE	: Ukuran Perusahaan
AGE	: Umur Perusahaan
SFD	: <i>Sustainable Finance</i>
α	: Konstanta
b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7	: Koefisien Regresi
e	: Standar Error

4. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau penjelas secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Pengujian ini dilakukan dengan uji-t pada tingkat keyakinan 95%.

Langkah-langkah Pengujian Uji T sebagai berikut :

a. Menentukan formulasi hipotesis

1) Formulasi hipotesis 1

Ho : $\beta_1 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *sustainable finance*

Ha : $\beta_1 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *sustainable finance*

2) Formulasi hipotesis 2

Ho : $\beta_2 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *sustainable finance*

Ha : $\beta_2 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *sustainable finance*

3) Formulasi hipotesis 3

Ho : $\beta_3 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap *sustainable finance*

Ha : $\beta_3 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap *sustainable finance*

4) Formulasi hipotesis 4

Ho : $\beta_4 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh tekanan *stakeholder* terhadap *sustainable finance*

Ha : $\beta_4 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh tekanan *stakeholder* terhadap *sustainable finance*

5) Formulasi hipotesis 5

Ho : $\beta_5 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh arus kas operasi terhadap *sustainable finance*

Ha : $\beta_5 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh arus kas operasi terhadap *sustainable finance*

6) Formulasi hipotesis 6

Ho : $\beta_6 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *sustainable finance*

Ha : $\beta_6 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *sustainable finance*

7) Formulasi hipotesis 7

$H_0 : \beta_7 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap *sustainable finance*

$H_a : \beta_7 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap *sustainable finance*

b. Menentukan *level of significance*

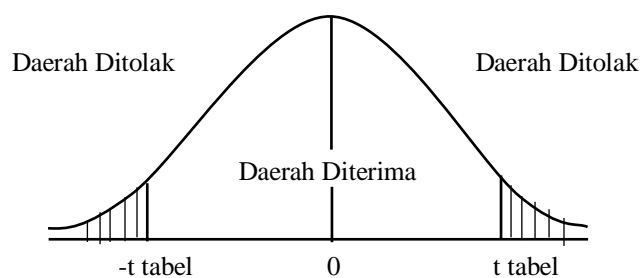
$\alpha = 5\%$ atau 0,05 atau *confidence* sebesar 95% dengan derajat kebebasan ($df = n-k-1$) dimana jumlah k adalah jumlah variabel bebas.

c. Menentukan kriteria pengujian

H_0 diterima apabila $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$

H_a diterima apabila $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$

Gambar 3.1
Kurva Uji Ststistik t



d. Pengujian hipotesis

$$t_{\text{hitung}} = \frac{B}{S_b}$$

keterangan :

b = Koefisien regresi variabel

S_b = Standar error

e. Membuat keputusan

Tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Tekanan *Stakeholder*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap *Sustainable Finance*.

Hipotesis yang telah diajukan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Dampak Ukuran Dewan Direksi terhadap *Sustainable Finance* :

Ho : $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ukuran Dewan Direksi terhadap *Sustainable Finance*

Ha : $\beta_1 \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Ukuran Dewan Direksi terhadap *Sustainable Finance*

2) Dampak Proporsi Komisaris Independen terhadap *Sustainable Finance*:

Ho : $\beta_2 = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Proporsi Komisaris Independen terhadap *Sustainable Finance*

Ha : $\beta_2 \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Proporsi Komisaris Independen terhadap *Sustainable Finance*

3) Dampak Ukuran Komite Audit terhadap *Sustainable Finance*:

Ho : $\beta_3 = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ukuran Komite Audit terhadap *Sustainable Finance*

Ha : $\beta_3 \neq 0$, Terdapat pengaruh signifikan antara Ukuran Komite Audit terhadap *Sustainable Finance*

4) Dampak Tekanan *Stakeholder* terhadap *Sustainable Finance* :

Ho : $\beta_4 = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Tekanan *Stakeholder* terhadap *Sustainable Finance*

Ha : $\beta_4 \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan Tekanan *Stakeholder* terhadap *Sustainable Finance*

5) Dampak Arus Kas Operasi terhadap *Sustainable Finance* :

Ho : $\beta_5 = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Arus Kas Operasi terhadap *Sustainable Finance*

Ha : $\beta_5 \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Arus Kas Operasi terhadap *Sustainable Finance*

6) Dampak Ukuran Perusahaan terhadap *Sustainable Finance* :

Ho : $\beta_6 = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ukuran Perusahaan terhadap *Sustainable Finance*

Ha : $\beta_6 \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Arus Kas Operasi terhadap *Sustainable Finance*

7) Dampak Umur Perusahaan terhadap *Sustainable Finance* :

Ho : $\beta_7 = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Umur Perusahaan terhadap *Sustainable Finance*

Ha : $\beta_7 \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Umur Perusahaan terhadap *Sustainable Finance*

5. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Tingkat signifikansi atau probabilitas adalah sebesar 5% atau 0,05. Uji F digunakan untuk uji variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji F^2 .

Hipotesis yang telah diajukan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 : \beta_5 : \beta_6 : \beta_7 = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Tekanan *Stakeholder*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap *Sustainable Finance*.

$H_a : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 : \beta_5 : \beta_6 : \beta_7 \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Tekanan *Stakeholder*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap *Sustainable Finance*.

a. Menentukan *level of significance*

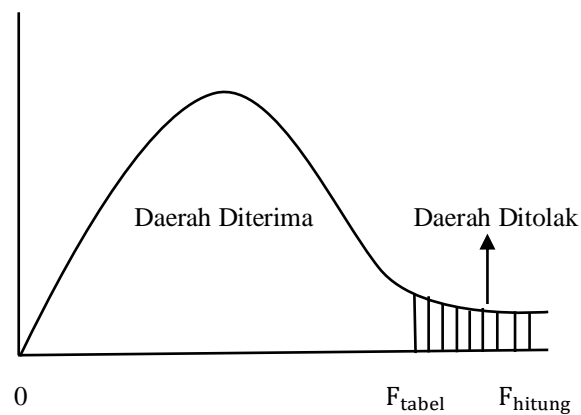
$\alpha = 5\%$ atau 0,05 atau *confidence* sebesar 95% dengan derajat kebebasan (k-1) dan k(n-1) dimana jumlah observasi serta k adalah jumlah variabel bebas.

b. Menentukan kriteria pengujian

H_0 diterima apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$

Gambar 1.2
Kurva Uji Statistik F



c. Pengujian hipotesis

$$F_{hitung} = \frac{K}{(n-k-1)}$$

Keterangan :

K = Jumlah kuadrat regresi

n = Jumlah data atau sampel

k = Jumlah variabel bebas

d. Membuat keputusan

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel X terhadap variabel Y.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh pengukuran model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap penambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Menurut Widarjono (2013:26) perhitungan R^2 atau koefisien determinasi sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{\sum (\gamma_i - \hat{\gamma})^2}{\sum (\gamma_i - \bar{\gamma})^2}$$

Keterangan :

γ_i = Observasi respons ke- i

$\hat{\gamma}$ = Rata-rata

$\bar{\gamma}$ = Ramalan respons ke- i

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Bursa Efek Indonesia

a. Sejarah Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange (IDX) atau dikenal juga sebagai Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil dari penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Pada tanggal 1 Desember 2007, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif guna demi efektivitas operasional dan transaksi. Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek dari pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek saham atau obligasi) diantara mereka.

Secara historis, pasar modal di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional sebagai upaya untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui ketersediaan sumber permodalan (Hadad, M: 2015:155). Pasar modal didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1912 di Batavia dengan tujuan untuk kepentingan kolonial atau VOC.

Pusat Bursa Efek Indonesia saat ini berada di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52-53, Semanggi, Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12190).

Meskipun pasar modal sudah ada sejak 1912, akan tetapi terjadi permasalahan adanya kevakuman yang berujung perang dunia I dan II sehingga perkembangan operasi pasar modal berhenti dan pertumbuhannya yang tidak berjalan dengan lancar. Pemerintah Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal tahun 1997 oleh Presiden Soeharto dan beberapa tahun kemudian, pasar modal berkembang pesat seiring berbagai insentif dan regulasi untuk peningkatan bursa Indonesia.

Secara singkat, sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia sebagai berikut :

Desember 1912	Tahun awal Bursa Efek di Indonesia didirikan di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda
1912 - 1918	Bursa Efek di Batavia untuk sementara waktu di tutup akibat perang dunia ke I
1925 - 1942	Bursa Efek di Jakarta, Bursa efek Semarang serta Bursa Efek Surabaya dibuka kembali karena kondisi pemerintah hindia belanda yang kondusif
Tahun 1939	Terjadinya masalah politik akibat dari perang dunia ke II

1942-1952	Bursa Efek di Jakarta di tutup kembali selama berlangsungnya perang dunia ke II
Tahun 1956	Adanya program nasionalisasi perusahaan Belanda, perkembangan Bursa Efek semakin tidak terlihat dan tidak aktif kembali
1956 - 1977	Bursa Efek kembali di buka akan tetapi perdagangan mengalami kevakuman
Agustus 1977	Bursa di resmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ di luncurkan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan pasar modal ditandai dengan go public PT. Semen Cibinong sebagai emiten pertama serta perkembangan Bursa Efek Indonesia yang baru
1977 - 1987	Transaksi di Bursa Efek nampak sepi karena kurang populer dan masih enggan perusahaan menerima sehingga masyarakat memilih instrumen perbankan
Tahun 1987	Lahirnya Pake Desember 87 (PAKDES87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan IPO dan khusus investor asing dalam menanamkan modal di Indonesia

1988 - 1990	Paket deregulasi di perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ dibuka untuk asing dan aktivitas transaksi di bursa meningkat
Juni 1988	Bursa Paralel Indonesia mulai beroperasi oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE) yang organisasinya terdiri dari dealer dan broker
Desember 1988	Lahirnya PAKDES88 dengan isi kebijakannya memberikan kemudahan perusahaan melakukan go public dan meningkatkan pasar modal di Indonesia
Juni 1989	PT Bursa Efek Surabaya kembali aktif
Juli 1992	BEJ mengubah dampak swastanisasi dan BAPEPAM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal serta diperingati HUT BEJ
Mei 1995	Diterapkannya sistem teknologi canggih disebut sistem otomatis perdagangan JATS (<i>Jakarta Automated Trading System</i>)
November 1995	Pemerintah menyerahkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal
Tahun 1995	Bursa Paralel Indonesia melakukan merger dengan Bursa Efek Surabaya

Tahun 2000	Sistem perdagangan tanpa warkat (<i>scripless trading</i>) mulai di aplikasikan di pasar modal
Tahun 2002	BEJ mulai mengaktifkan Sistem Perdagangan Jarak Jauh (<i>remote trading</i>)
Tahun 2007	Tahun dimana awal berdirinya Bursa Efek Indonesia
Maret 2009	PT Bursa Efek Indonesia merilis sistem perdagangan baru bernama JATS-NextG
Tahun 2011	BEI mulai berkembang dengan jumlah perusahaan sebanyak 25 emiten dan kapitalisasi pasar meningkat
Tahun 2012	Peluncuran prinsip syariah dan mekanisme perdagangan syariah
Januari 2012	Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan
Desember 2012	Pembentukan Securities Investor Protection Fund (SIPF)
Januari 2013	Pembaharuan jam perdagangan
Tahun 2014	Adanya perubahan satuan lot harga lembar saham dari 500 lembar per lot menjadi 100 lembar setiap lotnya

Januari 2014	Penyesuaian kembali Lot Size dan Tick Price
Tahun 2015	Diresmikanya LQ-45 Index Futures
November 2015	TICMI bergabung dengan IcaMEL serta peluncuran Yuk Nabung Saham
Tahun 2016	BEI mengikuti kegiatan Amesti pajak dan meresmikan Go Pubic Information Center
Tahun 2017	JATS merubah sistem secara otomatis. Harga saham Rp50-200 batas 35% saja per hari, untuk harga saham Rp200-5.000 hanya 25% per hari sedangkan harga saham diatas 5.000 menjadi 20% dan peresmian Indonesia Securities Fund
Februari 2017	relaksasi margin dan peresmian IDX Incubator
Tahun 2018	IHSG mencatat sejarah baru dengan point tertinggi di level 6.689,29 diperoleh selama bursa saham didirikan
Mei 2018	Pembaharuan sistem perdagangan dan new data center
Desember 2018	launching penyesuaian transaksi T+2 serta penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kode perusahaan tercatat

b. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia

- 1) Visi “Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia”
- 2) Misi “Menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)”

c. Manfaat Bursa Efek

- 1) Bagi Emiten
 - a) Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar
 - b) Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai
 - c) Tidak ada covenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan
 - d) Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan
 - e) Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil
- 2) Bagi Investor
 - a) Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapital gain

- b) Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi
- c) Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

a. Sejarah

Bank Mandiri (Persero) Tbk salah satu bank yang terbesar yang beroperasi di Indonesia yang didirikan pada 02 Oktober 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Kantor pusat Bank Mandiri berada di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36 – 38 Jakarta Selatan 12190 – Indonesia. Saat ini, Bank Mandiri mempunyai 12 kantor wilayah domestik, 83 kantor area, dan 1.297 kantor cabang pembantu, 1.075 kantor mandiri mitra usaha, 178 kantor kas, dan 6 cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Dili Timor Plaza dan Shanghai (Republik Rakyat Cina).

Bank Mandiri mengalami kondisi restrukturisasi sehingga adanya penggabungan dalam satu bank antara lain PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero). Penggabungan atau merger empat bank tersebut dengan Bank Mandiri dilakukan pada tanggal 31 Juli 1999. Dimana masing-

masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan saat ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia

Selain itu, Bank Mandiri juga mewarisi 9 core banking system berbeda dari keempat bank yang digabung bersama. Setelah berinvestasi untuk melakukan konsolidasi awal dari sistem yang berbeda, Bank Mandiri selanjutnya melakukan program pergantian platform untuk kegiatan consumer banking dan meningkatkan kemampuan penetrasi di segmen retail banking. Pada masa transisi menyatukan semua sistem, sistem Bank Exim dipilih untuk digunakan pada tahun 1999 hingga 2001. Pada tahun 2003 – 2004, sistem tersebut diubah menjadi sistem Bank Mandiri saat semua sistem telah disatukan.

1) Program transformasi tahap I (2005-2009) :

Bank Mandiri memutuskan untuk menjadi bank yang unggul di regional (regional champion Bank), yang diwujudkan dalam program transformasi yang dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi utama, yaitu: implementasi budaya, pengendalian tingkat NPL secara agresif, meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata, pengembangan dan pengelolaan program aliansi.

2) Program transformasi tahap II (2010-2014) :

Bank Mandiri melakukan revitalisasi visinya untuk “menjadi lembaga keuangan di Indonesia yang dikagumi dan selalu progresif”. Pada tahun 2014 ini, Bank Mandiri ditargetkan mampu mencapai nilai kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia serta masuk dalam jajaran Top 5 Bank di ASEAN.

3) Program transformasi tahap III (2015-2020) :

Tahun 2015 merupakan tahun yang penting bagi Bank Mandiri karena kinerja Bank Mandiri di 2015 akan menjadi barometer dan landasan dalam menghadapi serta menyelesaikan tantangan yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang. Tantangan ke depan yang semakin kompleks dan kebutuhan terus semakin meningkatkan kinerja secara berkesinambungan serta memberikan kualitas layanan terbaik kepada nasabah membuat Bank Mandiri perlu melakukan transformasi bisnis dan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan.

1) **Visi dan Misi**

Visi “Menjadi partner finansial pilihan utama Anda”

- 2) Misi “Menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi bagian hidup nasabah”

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

a. Sejarah

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895. Suatu lembaga keuangan perbankan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Kantor pusat Bank BRI berlokasi di Gedung BRI I, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210. Saat ini, BBRI memiliki 19 kantor wilayah, 1 kantor inspeksi pusat, 19 kantor inspeksi wilayah, 462 kantor cabang domestik, 1 kantor cabang khusus, 609 kantor cabang pembantu, 984 kantor kas, 5.380 BRI unit, 3.180 teras & teras keliling dan 3 teras kapal.

Bank BRI juga memiliki 2 kantor cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands dan Singapura, 2 kantor perwakilan yang berlokasi di New York dan Hong Kong, serta memiliki 5 anak usaha yaitu Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO), PT Bank BRISyariah (BRIS), PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRI Life), BRI Remittance Co. Ltd Hong Kong dan PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance). Sejarah awal didirikannya bank BRI hingga sekarang ini yakni :

- 1) Tahun 1895 merupakan tahun awal Bank BRI didirikan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah
- 2) Tahun 1948 terjadinya peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan BRI ditutup untuk sementara waktu
- 3) Tahun 1949 kegiatan Bank BRI beroperasi kembali dengan nama Bank Rakyat Indonesia Serikat setelah adanya perjanjian Renville
- 4) Tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas oleh Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992
- 5) Tahun 2003 Bank Rakyat Indonesia menjadi perusahaan publik dengan memutuskan untuk menjual 30% sahamnya dan memiliki nama resmi yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

b. Visi dan Misi

- 1) Visi “Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best Talent”
- 2) Misi “Memberikan yang terbaik, menyediakan pelayanan yang prima dan bekerja dengan optimal dan baik”

4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

a. Sejarah

Pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Kantor pusat BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 – Indonesia. Bank BNI memiliki 196 kantor cabang, 944 cabang pembantu domestik serta 829 outlet lainnya. Selain itu, jaringan Bank BNI juga meliputi 5 kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London dan Korea Selatan serta 1 kantor perwakilan di New York.

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saing di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun

1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah, maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Selain itu juga, BNI melakukan kegiatan usaha di dalam perusahaan termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah melalui anak usaha dan kegiatan diluar perbankan antara lain asuransi, pembiayaan, sekuritas dan jasa keuangan.

1) **Visi dan Misi**

Visi “Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja”

2) Misi :

- a) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama
- b) Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor
- c) Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi
- d) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas
- e) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik

5. PT Bank Central Asia Tbk

a. Sejarah

BCA didirikan di negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1955 No. 38 dengan nama “N.V. Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang Knitting Factory”. BCA mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 Oktober 1956. Selama beroperasi BCA mengalami beberapa kali perubahan nama sampai akhirnya pada tanggal 21 Mei 1974 menjadi PT Bank Central Asia. Kantor pusat BCA berlokasi di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 1, Jakarta 10310.

Salah satu kejadian penting dalam sejarah BCA adalah pada tahun 1997 ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi tersebut mempengaruhi aliran dana tunai BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutan perusahaan. Dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan menurun, banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, BCA terpaksa harus meminta bantuan dari pemerintah.

Pada tahun 2000an, BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama perbankan elektronik dengan memperkenalkan Debit BCA, Tunai BCA, internet banking KlikBCA, mobile banking m-BCA, EDCBIZZ, dan lain-lain. BCA mendirikan fasilitas Disaster Recovery Center di Singapura. BCA

meningkatkan kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk melalui ekspansi ke bidang pembiayaan mobil melalui entitas anaknya (BCA Finance).

Tahun 2010 sampai 2013, BCA memasuki lini bisnis baru yaitu perbankan Syariah, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum dan sekuritas. Di tahun 2013, BCA menambah kepemilikan efektif dari 25% menjadi 100% pada perusahaan asuransi umum, PT Asuransi Umum BCA (sebelumnya bernama PT Central Sejahtera Insurance dan dikenal juga sebagai BCA Insurance).

Tahun 2014-2016, BCA mengembangkan ‘MyBCA’, suatu gerai layanan perbankan digital yang dapat digunakan secara mandiri (self service); melanjutkan pengembangan jaringan ATM berbasis Cash Recycling Machine; dan meluncurkan produk ‘Sakuku’, electronic wallet berbasis aplikasi. Selanjutnya untuk tahun 2017 sampai 2018, mengembangkan kembali metode pembayaran transaksi melalui aplikasi ‘BCA Mobile’ dan ‘Sakuku’, BCA meluncurkan fitur peer-to-peer transfer berbasis teknologi QR code di tahun 2018. BCA juga meluncurkan layanan ‘OneKlik’, suatu fitur pembayaran pada online merchants yang mengutamakan kecepatan dan kenyamanan transaksi.

b. Visi dan Misi

- 1) Visi “Bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia”

2) Misi :

- a) Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perorangan.
- b) Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- c) Meningkatkan nilai francais dan nilai stakeholders BCA

6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

a. Sejarah

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dengan kode emiten BJTM yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan nama awal PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1961 dan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Kantor pusat Bank Jatim berlokasi di Jl. Basuki Rachmat No.98-104 Surabaya 60271 Jawa Timur. Bank Jatim memiliki 41 kantor cabang, 158 kantor cabang pembantu, 191 kantor kas, 174 payment point dan 79 kas mobil serta 1 unit usaha Syariah yang mempunyai 7 cabang Syariah, 8 kantor cabang pembantu Syariah,

191 kantor layanan Syariah, 6 payment point Syariah dan 6 kas mobil Syariah. Bank Jatim memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia (BI) No 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

b. Visi dan Misi

- 1) Visi : Menjadi "BPD No. 1" di Indonesia
- 2) Misi :
 - a) Akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju digital bank dengan SDM yang berdaya saing tinggi
 - b) Memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
 - c) Menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan

7. PT Bank CIMB Niaga Tbk

a. Sejarah

Bank CIMB Niaga didirikan pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Selama dekade awal operasinya, fokus Bank adalah membangun nilai-nilai inti dan mengembangkan profesionalisme di bidang perbankan. Bank CIMB Niaga segera diakui sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Pada tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya di pasar lokal dengan menjadi bank Indonesia pertama yang menyediakan pelanggan dengan akses ke rekening mereka melalui akses ATM. Dalam banyak hal, ini diakui sebagai masuknya Indonesia ke era perbankan modern. Kepemimpinan Bank CIMB

Niaga dalam penerapan teknologi semakin ditingkatkan pada tahun 1991 setelah menjadi bank pertama yang menyediakan fasilitas perbankan online.

Bank CIMB Niaga telah mengalami penggabungan usaha dengan empat bank diantaranya PT Bank Agung, PT Bank Tabungan Bandung, PT Amerta dan PT Bank Lippo. Kantor pusat Bank CIMB Niaga berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta. Saat ini Bank CIMB Niaga memiliki 156 kantor cabang, 586 kantor cabang pembantu, 34 kantor pembayaran, 30 Unit cabang Syariah dan 616 kantor layanan Syariah.

b. Visi dan Misi

- 1) Visi “Untuk Be The Leading ASEAN Perusahaan”
- 2) Misi “Untuk memberikan layanan perbankan universal di Indonesia sebagai perusahaan berkinerja tinggi, terlembagakan dan terintegrasi yang berlokasi di ASEAN dan pasar-pasar utama di luar dan untuk memperjuangkan percepatan integrasi ASEAN dan hubungan kawasan ini dengan seluruh dunia”.

8. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

a. Sejarah

PT Bank Maybank Indonesia adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di seluruh ASEAN. Sebelumnya, Maybank

Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, setelah mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger di Bursa Efek Indonesia) pada 1989.

Kantor pusat Bank Maybank beralamat di Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta 10270 – Indonesia. Maybank Indonesia sekarang memiliki 374 cabang termasuk cabang syariah yang tersebar di Indonesia serta satu cabang di luar negeri yakni (Mumbai, India), 21 Mobil Kas Keliling dan 1.571 ATM termasuk CDM (Cash Deposit Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM Prima, ATM Bersama, Alto, Cirrus dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura, Malaysia dan Brunei.

b. Visi dan Misi

- 1) Visi “Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas”
- 2) Misi :
 - a) Menyediakan akses yang nyaman bagi masyarakat untuk mendapatkan produk dan layanan perbankan
 - b) Memberikan persyaratan dan harga yang wajar

- c) Memberikan advice kepada Nasabah berdasarkan kebutuhan
- d) Berada di tengah komunitas

9. PT Bank Permata Tbk

a. Sejarah

Bank Permata Tbk dahulunya merupakan Bank Bali Tbk yang didirikan 17 Desember 1954 dengan nama "Bank Persatuan Dagang Indonesia" dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Januari 1955. PT Bank Permata Tbk telah memperoleh izin sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1937/U.M.II tanggal 19 Februari 1957. Bank Permata telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kantor pusat Bank Permata berlokasi di Gedung World Trade Center II, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia.

PermataBank menawarkan rangkaian lengkap dari produk dan jasa perbankan yang meliputi Rekening Giro dan Tabungan, Deposito Berjangka, Reksa Dana, Obligasi, Pinjaman Perorangan, Kartu Kredit dan Hipotek untuk konsumen retail yang tersedia dalam Konvensional dan Syariah serta menawarkan pinjaman Modal Usaha, Dealer Finance, Join Finance, Transaksi Perbankan, Trade Finance, Forex, begitupun dengan layanan Sekuritas dan Jasa Agensi pengembangan bisnis SME dan Wholesale.

b. Visi dan Misi

- 1) Visi “Menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi stakeholder”
- 2) Misi :
 - a) Berperan aktif sebagai mitra di bidang keuangan dan agen pembangunan yang efisien bagi nasabah dan masyarakat
 - b) Memberikan layanan keuangan menyeluruh secara sederhana, cepat, andal dan inovatif
 - c) Berkomitmen untuk memberikan pengalaman unggul bagi pemangku kepentingan dan membangun nilai positif bagi pemegang saham

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

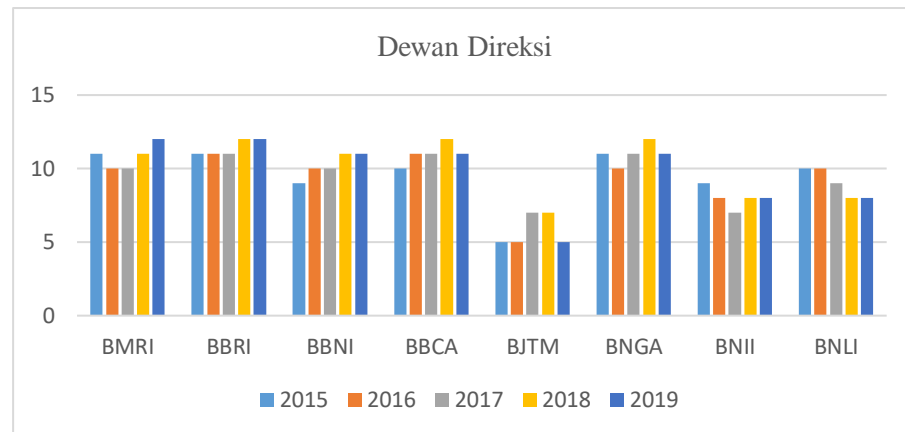
Analisis statistik deskriptif merupakan pengujian pertama yang dilakukan dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran karakteristik serta penyebaran data sampel penelitian, dengan cara melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran mean, nilai minimal dan maksimal, serta standar deviasi semua variabel tersebut. Selanjutnya dilakukan uji analisis statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS versi 22. Analisis statistik deskriptif ditunjukkan sebagai berikut :

a) Dewan Direksi

Tabel 4.1
Data Anggota Dewan Direksi Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Ukuran Dewan Direksi
BMRI	2015	11
	2016	10
	2017	10
	2018	11
	2019	12
BBRI	2015	11
	2016	11
	2017	11
	2018	12
	2019	12
BBNI	2015	9
	2016	10
	2017	10
	2018	11
	2019	11
BBCA	2015	10
	2016	11
	2017	11
	2018	12
	2019	11
BJTM	2015	5
	2016	5
	2017	7
	2018	7
	2019	5
BNGA	2015	11
	2016	10
	2017	11
	2018	12
	2019	11
BNII	2015	9
	2016	8
	2017	7
	2018	8
	2019	8
BNLI	2015	10
	2016	10
	2017	9
	2018	8
	2019	8

Gambar 2.1
Grafik Deskriptif Dewan Direksi Tahun 2015-2019



Pada grafik diatas dapat dilihat tingkat dewan direksi dengan total 8 sampel perusahaan perbankan selama 5 tahun menunjukan bahwa tingkat rekor tertinggi dewan direksi tahun 2015 terdapat pada perusahaan BMRI, BBRI dan BNGA sebesar 12 serta posisi terendah pada perusahaan BJTM sebesar 5. Tingkat rekor tertinggi dewan direksi tahun 2016 terdapat pada perusahaan BBRI dan BBKA sebesar 11 serta posisi terendah pada perusahaan BJTM sebesar 5. Tingkat rekor tertinggi tahun 2017 terdapat pada perusahaan BBRI, BBKA dan BNGA sebesar 11 serta posisi terendah pada perusahaan BJTM dan BNII sebesar 7. Tingkat rekor tertinggi tahun 2018 pada perusahaan BBRI sebesar 12 serta posisi terendah pada perusahaan BJTM sebesar 7 sedangkan tingkat rekor tertinggi tahun 2019 pada perusahaan BBRI sebesar 12 serta posisi terendah pada perusahaan BJTM sebesar 5.

Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Dewan Direksi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DD	40	5	12	9,65	1,981
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Ouput SPSS 22, Data yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel independen (X1) yaitu dewan direksi memiliki hasil jumlah rata-rata 9,65 hal ini berarti bahwa jumlah dewan direksi pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 rata-rata 9 orang, dengan standar deviasi sebesar 1,981 atau 1 orang. Jumlah minimum dewan direksi 5 orang yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) tahun 2015, 2016 dan 2019 sedangkan jumlah maksimum dewan direksi 12 orang yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tahun 2018 dan 2019.

b) Komisaris Independen

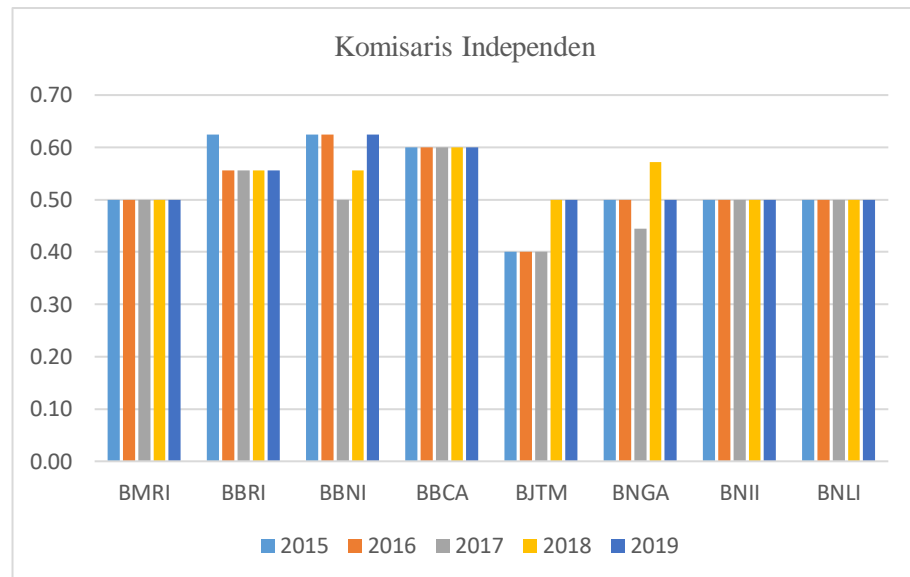
Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Komisaris Independen Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Komisaris Independen	Rata-rata Komisaris Independen
BMRI	2015	8	4	0,50
	2016	8	4	0,50
	2017	8	4	0,50
	2018	8	4	0,50
	2019	8	4	0,50
BBRI	2015	8	5	0,63
	2016	9	5	0,56
	2017	9	5	0,56
	2018	9	5	0,56
	2019	9	5	0,56
BBNI	2015	8	5	0,63

	2016	8	5	0,63
	2017	8	4	0,50
	2018	9	5	0,56
	2019	8	5	0,63
BBCA	2015	5	3	0,60
	2016	5	3	0,60
	2017	5	3	0,60
	2018	5	3	0,60
	2019	5	3	0,60
BJTM	2015	5	2	0,40
	2016	5	2	0,40
	2017	5	2	0,40
	2018	4	2	0,50
	2019	6	3	0,50
BNGA	2015	8	4	0,50
	2016	8	4	0,50
	2017	9	4	0,44
	2018	7	4	0,57
	2019	8	4	0,50
BNII	2015	6	3	0,50
	2016	6	3	0,50
	2017	6	3	0,50
	2018	6	3	0,50
	2019	6	3	0,50
BNLI	2015	8	4	0,50
	2016	8	4	0,50
	2017	8	4	0,50
	2018	8	4	0,50
	2019	8	4	0,50

Sumber : Data yang diolah 2020

Gambar 4.2
Grafik Deskriptif Komisaris Independen tahun 2015-2019



Pada grafik diatas dapat dilihat tingkat komisaris independen dengan total 8 sampel perusahaan perbankan selama 5 tahun menunjukan bahwa tingkat rekor tertinggi komisaris independen tahun 2015 pada perusahaan BBRI, BBNI dan BBKA sebesar 0,63 serta posisi terendah pada perusahaan BJTM sebesar 0,4. Tingkat rekor tertinggi tahun 2016 pada perusahaan BBNI, BBKA dan BBRI sebesar 0,63 serta posisi terendah pada perusahaan BJTM sebesar 0,4. Tingkat rekor tertinggi tahun 2017 pada perusahaan BBKA sebesar 0,6 serta posisi terendah pada perusahaan BJTM sebesar 0,4. Tingkat rekor tertinggi tahun 2018 pada perusahaan BBKA sebesar 0,6 serta posisi terendah pada perusahaan BBRI, BBNI, BBKA dan BNGA sebesar 0,6 serta posisi terendah pada perusahaan BMRI sebesar 0,4. Tingkat rekor tertinggi tahun 2019 pada perusahaan BBNI sebesar 0,6 serta posisi terendah pada perusahaan BMRI, BJTM, BNGA, BNII dan BNLI sebesar 0,4.

Tabel 4.4
Hasil Analisis Statistik Komisaris Independen

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	40	,40	,63	,5257	,06151
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Ouput SPSS 22, Data yang diolah 2020

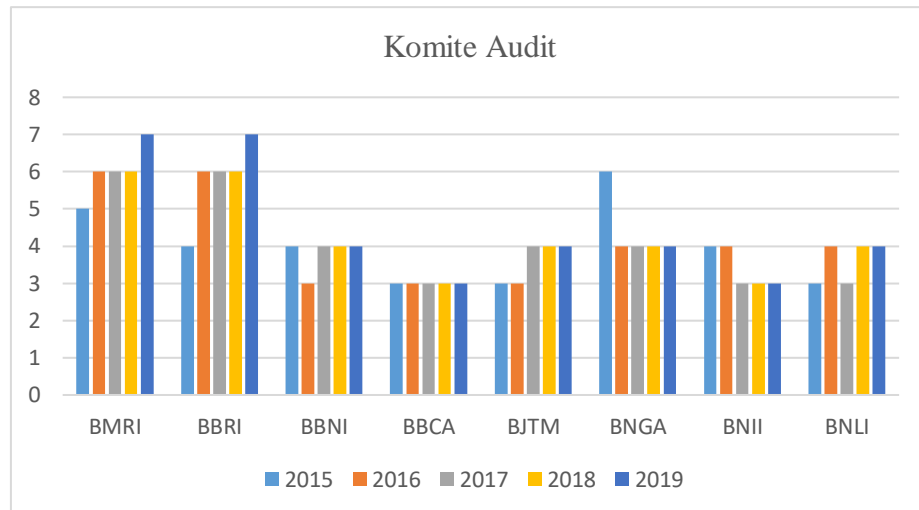
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa komisaris independen (X2) dengan jumlah rata-rata sebesar 0,5257 hal ini berarti bahwa rata-rata komisaris independen apabila dibandingkan dengan total dewan komisaris yang ada pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 adalah 52% dengan standar deviasi sebesar 0,06151 atau 61,51%. Jumlah minimum komisaris independen apabila dibandingkan dengan total dewan komisaris yang ada dalam perbankan yaitu 0,40 atau 40% yaitu PT Pembangunan Daerah Jawa Timur (BJTM) tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 sedangkan jumlah maksimum komisaris independen 0,63 atau 63% yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tahun 2015 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) tahun 2015, 2016 dan 2019.

c) Komite Audit

Tabel 4.5
Hasil Data Anggota Komite Audit Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Komite Audit
BMRI	2015	5
	2016	6
	2017	6
	2018	6
	2019	7
BBRI	2015	4
	2016	6
	2017	6
	2018	6
	2019	7
BBNI	2015	4
	2016	3
	2017	4
	2018	4
	2019	4
BBCA	2015	3
	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
BJTM	2015	3
	2016	3
	2017	4
	2018	4
	2019	4
BNGA	2015	6
	2016	4
	2017	4
	2018	4
	2019	4
BNII	2015	4
	2016	4
	2017	3
	2018	3
	2019	3
BNLI	2015	3
	2016	4
	2017	3
	2018	4
	2019	4

Gambar 4.3
Grafik Deskriptif Komite Audit Tahun 2015-2019



Pada grafik diatas dapat dilihat tingkat komite audit dengan total 8 sampel perusahaan perbankan penelitian selama 5 tahun menunjukan bahwa tingkat rekor tertinggi tahun 2015 pada perusahaan BNGA sebesar 6 serta posisi terendah pada perusahaan BBKA, BJTM dan BNLI sebesar 3. Tingkat tertinggi tahun 2016 pada perusahaan BMRI dan BBRI sebesar 6 serta posisi terendah pada perusahaan BBNi, BBKA, dan BJTM sebesar 3. Tingkat tertinggi tahun 2017 pada perusahaan BMRI dan BBRI sebesar 6 serta posisi terendah pada perusahaan BBKA, BNII dan BNLI sebesar 3. Tingkat tertinggi tahun 2018 pada perusahaan BMRI dan BBRI sebesar 6 serta posisi terendah pada perusahaan BBKA dan BNII sebesar 3. Tingkat tertinggi tahun 2019 pada perusahaan BMRI dan BBRI sebesar 7 serta posisi terendah pada perusahaan BBKA dan BNII sebesar 3.

Tabel 4.6
Hasil Analisis Statistik Komite Audit

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KA	40	3	7	4,20	1,224
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Ouput SPSS 22, Data yang diolah 2020

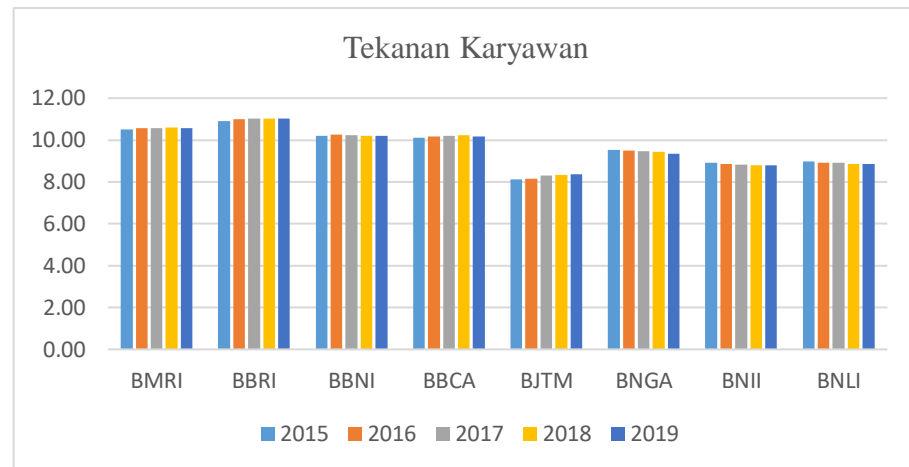
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa komite audit (X3) dengan jumlah rata-rata sebesar 4,20 hal ini berarti bahwa jumlah rata-rata komite audit pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 yaitu 4 orang dengan standar deviasi 1,224 atau sekitar 1 orang. Jumlah minimum komite audit yaitu 3,00 atau 3 orang terdapat pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) tahun 2016, PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (BBCA) tahun 2015-2019, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) tahun 2015 dan 2016, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) tahun 2017-2019 serta Bank Permata Tbk (BNLI) tahun 2015 dan 2017. Selanjutnya jumlah maksimum 7,00 atau 7 orang yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tahun 2019 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tahun 2019.

d) Tekanan Karyawan

Tabel 4.7
Data Perhitungan Jumlah Karyawan Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Jml Karyawan	<i>Ln Tk</i>
BMRI	2015	36.737	10,51
	2016	38.940	10,57
	2017	38.307	10,55
	2018	39.809	10,59
	2019	39.065	10,57
BBRI	2015	54.859	10,91
	2016	58.885	10,98
	2017	60.683	11,01
	2018	60.553	11,01
	2019	61.768	11,03
BBNI	2015	26.875	10,20
	2016	28.390	10,25
	2017	27.803	10,23
	2018	27.224	10,21
	2019	27.211	10,21
BBCA	2015	24.814	10,12
	2016	26.364	10,18
	2017	26.962	10,20
	2018	27.561	10,22
	2019	25.877	10,16
BJTM	2015	3.405	8,13
	2016	3.446	8,14
	2017	4.042	8,30
	2018	4.186	8,34
	2019	4.252	8,36
BNGA	2015	13.577	9,52
	2016	13.185	9,49
	2017	12.782	9,46
	2018	12.461	9,43
	2019	11.326	9,33
BNII	2015	7.421	8,91
	2016	6.908	8,84
	2017	6.727	8,81
	2018	2.820	7,94
	2019	2.670	7,89
BNLI	2015	7.892	8,97
	2016	7.499	8,92
	2017	7.542	8,93
	2018	7.125	8,87
	2019	7.120	8,87

Gambar 4.4
Grafik Deskriptif Tekanan Karyawan Tahun 2015-2019



Pada grafik diatas dapat dilihat tingkat tekanan karyawan dengan total 8 sampel perusahaan perbankan penelitian selama 5 tahun dapat menunjukan bahwa tingkat tekanan karyawan rekor tertinggi selama periode penelitian pada perusahaan BBRI tahun 2017 sebesar 11,01, tahun 2018 sebesar 11,01, tahun 2019 sebesar 11,03 sedangkan posisi terendah tekanan karyawan selama periode penelitian terletak pada perusahaan BJTM tahun 2015 sebesar 8,13, tahun 2016 sebesar 8,14, tahun 2017 sebesar 8,30 tahun 2018 sebesar 8,34, tahun 2019 sebesar 8,34.

Tabel 4.8
Hasil Analisis Statistik Tekanan Karyawan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TK	40	7,89	11,03	9,6290	,97096
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Ouput SPSS 22, Data yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tekanan karyawan (X4) dengan rata-rata dari logarita natural jumlah tekanan karyawan sebesar 9,6290 hal ini berarti bahwa rata-rata dari logaritma natural jumlah tekanan karyawan pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 yaitu 9 orang dengan standar deviasi sebesar 0,97096 atau 9 orang. Jumlah minimum tekanan stakeholder yaitu 8,13 atau 8 terdapat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) tahun 2015-2019, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) tahun 2015-2019 serta Bank Permata Tbk (BNLI) tahun 2015-2019. Selanjutnya jumlah maksimum sebesar 11,44 atau 11 orang yaitu terletak pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tahun 2015- 2019.

e) Arus kas Operasi

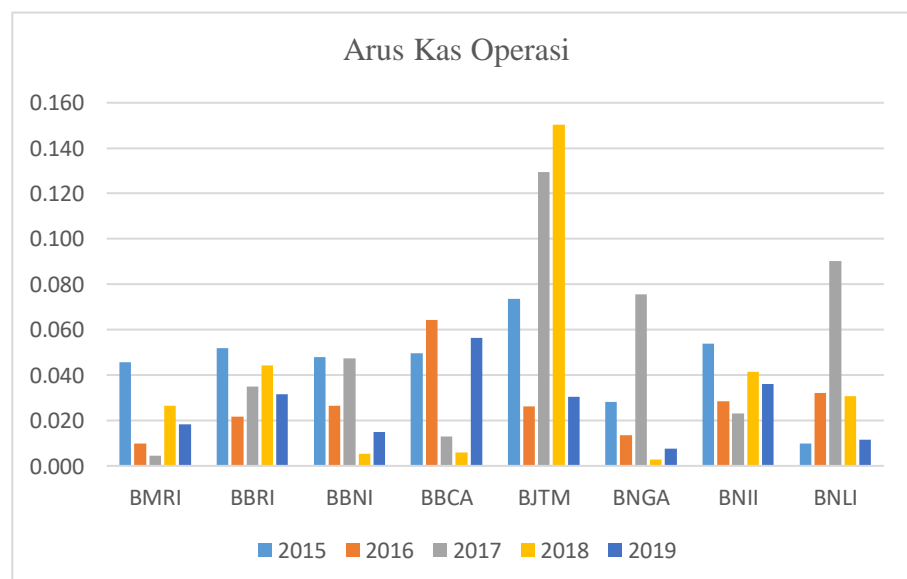
Tabel 4.9
Data Perhitungan Arus Kas Operasi Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Arus Kas Operasi	Total Aset	Rata-Rata Arus Kas Operasi
BMRI	2015	10.201.454	1.038.706.009	0,010
	2016	41.521.119	910.063.409	0,046
	2017	4.952.703	1.124.700.847	0,004
	2018	31.962.470	1.202.252.094	0,027
	2019	23.967.890	1.318.246.335	0,018
BBRI	2015	45.566.447	878.426.312	0,052
	2016	22.178.738	1.004.801.673	0,022
	2017	39.067.326	1.127.447.489	0,035
	2018	57.262.380	1.296.898.292	0,044
	2019	44.583.078	1.416.758.840	0,031
BBNI	2015	24.356.628	508.595.288	0,048
	2016	15.999.051	603.031.880	0,027
	2017	33.625.853	709.330.084	0,047
	2018	4.274.095	808.572.011	0,005
	2019	12.611.042	845.605.208	0,015
BBCA	2015	29.459.026	594.372.770	0,050
	2016	43.473.049	676.738.753	0,064

	2017	9.658.627	750.319.761	0,013
	2018	4.912.562	824.787.944	0,006
	2019	51.942.040	918.989.312	0,057
BJTM	2015	3.150.353	42.803.631	0,074
	2016	1.132.088	43.032.950	0,026
	2017	6.663.420	51.518.681	0,129
	2018	9.427.320	62.689.118	0,150
	2019	2.337.757	76.715.290	0,030
BNGA	2015	6.755.174	238.849.252	0,028
	2016	3.291.332	241.571.728	0,014
	2017	20.129.300	266.305.445	0,076
	2018	749.516	266.781.498	0,003
	2019	2.070.946	274.467.227	0,008
BNII	2015	8.496.395	157.619.013	0,054
	2016	4.730.653	166.678.902	0,028
	2017	3.996.679	173.253.491	0,023
	2018	7.366.174	177.532.858	0,041
	2019	6.099.537	169.082.830	0,036
BNLI	2015	1.808.383	182.689.351	0,010
	2016	5.333.310	165.527.512	0,032
	2017	13.394.147	148.328.370	0,090
	2018	4.698.941	152.892.866	0,031
	2019	1.879.571	161.451.259	0,012

Sumber : Data yang diolah 2020

Gambar 4.5
Grafik Deskriptif Arus Kas Operasi Tahun 2015-2019



Pada grafik diatas dapat dilihat tingkat arus kas operasi dengan total sampel 8 perusahaan perbankan penelitian selama 5 tahun dapat menunjukan bahwa tingkat arus kas operasi tahun 2015 tingkat tertinggi pada perusahaan BJTM sebesar 0,07 dan posisi terendah pada perusahaan BNLH sebesar 0,01. Tingkat rekor tertinggi tahun 2016 pada perusahaan BBKA sebesar 0,064 dan posisi terendah pada perusahaan BMRI dan BNKA sebesar 0,014. Tingkat rekor tertinggi tahun 2017 pada perusahaan BJTM sebesar 0,129 dan posisi terendah pada perusahaan BMRI sebesar 0,004. Tingkat tertinggi tahun 2018 pada perusahaan BJTM sebesar 0,15 dan posisi terendah pada perusahaan BNKA sebesar 0,003. Tingkat tertinggi tahun 2019 pada perusahaan BBKA sebesar 0,057 dan posisi terendah pada perusahaan BNKA sebesar 0,008.

Tabel 4.10
Hasil Analisis Statistik Arus Kas Operasi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKO	40	,00	,15	,0379	,03178
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Ouput SPSS 22, Data yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa arus kas operasi (X5) dengan jumlah rata-rata sebesar 0,03790 hal ini berarti bahwa rata-rata arus kas kegiatan operasi apabila dibandingkan dengan total aset yang tercantum dalam *annual report* pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 adalah Rp3.790,00 dengan standar deviasi

sebesar 0,03178 atau 3,17%. Jumlah minimum arus kas operasi apabila dibandingkan dengan total aset yang tercantum dalam *annual report* pada perbankan yaitu 0,00 atau adanya arus kas operasi dan total aset yang masih rendah yang yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tahun 2015 dan 2017, PT Bank Cetril Asia (Persero) Tbk (BBCA) tahun 2018, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) tahun 2018 dan 2019 serta Bank Permata Tbk (BNLI) tahun 2015. Selanjutnya jumlah maksimum 0,15 atau 15% yaitu pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) tahun 2018.

f) Ukuran Perusahaan

Tabel 4.11

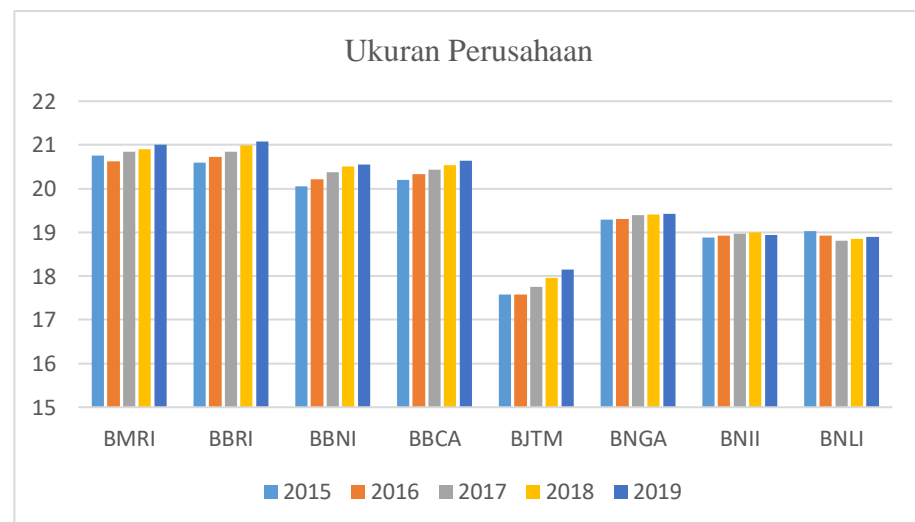
Kode Emiten	Tahun	Total Aset	<i>Ln Total Aset (Size)</i>
BMRI	2015	910.063.409	20,63
	2016	1.038.706.009	20,76
	2017	1.124.700.847	20,84
	2018	1.202.252.094	20,91
	2019	1.318.246.335	21,00
BBRI	2015	878.426.312	20,59
	2016	1.003.644.426	20,73
	2017	1.127.447.489	20,84
	2018	1.296.898.292	20,98
	2019	1.416.758.840	21,07
BBNI	2015	508.595.288	20,05
	2016	603.031.880	20,22
	2017	709.330.084	20,38
	2018	808.572.011	20,51
	2019	845.605.208	20,56
BBCA	2015	594.372.770	20,20
	2016	676.738.753	20,33
	2017	750.319.671	20,44
	2018	824.787.944	20,53
	2019	918.989.312	20,64
BJTM	2015	42.803.631	17,57
	2016	43.032.950	17,58

	2017	51.518.681	17,76
	2018	62.689.118	17,95
	2019	76.715.290	18,16
BNGA	2015	238.849.252	19,29
	2016	241.571.728	19,30
	2017	266.305.445	19,40
	2018	266.781.498	19,40
	2019	274.467.227	19,43
BNII	2015	157.619.013	18,88
	2016	166.678.902	18,93
	2017	173.253.491	18,97
	2018	177.532.858	18,99
	2019	169.082.830	18,95
BNLI	2015	182.689.351	19,02
	2016	165.527.512	18,92
	2017	148.328.370	18,81
	2018	152.892.866	18,85
	2019	161.451.259	18,90

Data Total Aset Perusahaan Perbankan Tahun 2015-201

Sumber : Data yang diolah 2020

Gambar 4.6
Grafik Deskriptif Ukuran Perusahaan Tahun 2015-2019



Pada grafik diatas dapat dilihat tingkat ukuran perusahaan dengan total 8 sampel penelitian selama 5 tahun yang menunjukkan bahwa tingkat ukuran perusahaan tertinggi tahun 2015 pada perusahaan BMRI sebesar 20,76 dan posisi terendah pada perusahaan BJTM sebesar 17,57. Tingkat tertinggi tahun 2016 pada perusahaan BBRI sebesar

20,73 dan posisi terendah pada perusahaan BJTM sebesar 17,58. Tingkat tertinggi tahun 2017 pada perusahaan BMRI dan BBRI sebesar 20,84 dan posisi terendah pada perusahaan BJTM sebesar 17,76. Tingkat tertinggi tahun 2018 pada perusahaan BBRI sebesar 21,00 dan kondisi terendah pada perusahaan BJTM sebesar 18,00 selanjutnya tingkat tertinggi tahun 2019 pada perusahaan BBRI sebesar 21,07 dan posisi terendah pada BJTM sebesar 18,16.

Tabel 4.12
Hasil Analisis Statistik Ukuran Perusahaan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SIZE	40	17,57	21,07	19,6820	1,05029
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Ouput SPSS 22, Data yang diolah 2020

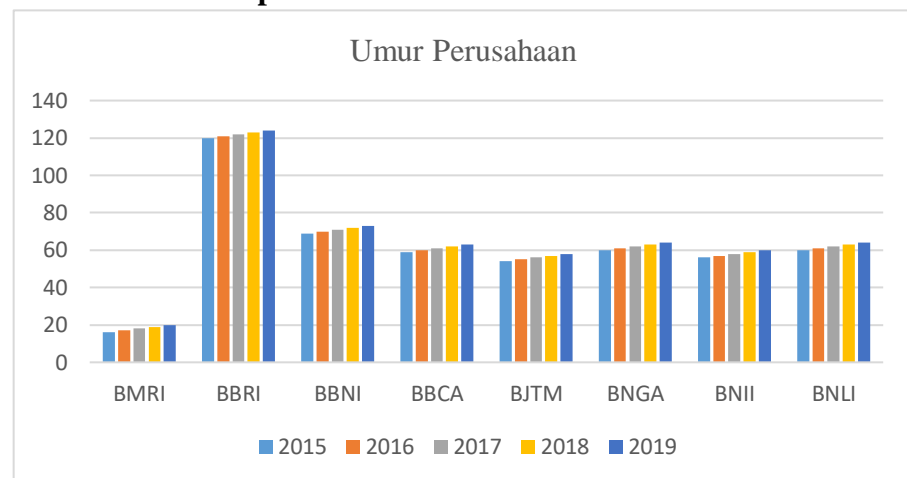
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan (X6) dengan jumlah rata-rata sebesar 19,6820 hal ini berarti logaritma natural dari total aset yang tercantum dalam *annual report* pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 yaitu sebesar Rp 196.820,00 sedangkan standar deviasinya 1,05029 atau 1.000. Jumlah minimum total aset dari ukuran perusahaan yaitu 17,57 atau 17,57% yaitu pada Bank Pembangunan daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) tahun 2015-2018. Selanjutnya jumlah maksimumnya 21,07 atau 21,07% yaitu terdapat pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tahun 2019.

g) Umur perusahaan

Tabel 4.13
Data Perhitungan Umur Perusahaan Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Tahun Berdiri	Umur (Age)
BMRI	2015	1999	16
	2016	1999	17
	2017	1999	18
	2018	1999	19
	2019	1999	20
BBRI	2015	1895	120
	2016	1895	121
	2017	1895	122
	2018	1895	123
	2019	1895	124
BBNI	2015	1946	69
	2016	1946	70
	2017	1946	71
	2018	1946	72
	2019	1946	73
BBCA	2015	1956	59
	2016	1956	60
	2017	1956	61
	2018	1956	62
	2019	1956	63
BJTM	2015	1961	54
	2016	1961	55
	2017	1961	56
	2018	1961	57
	2019	1961	58
BNGA	2015	1955	60
	2016	1955	61
	2017	1955	62
	2018	1955	63
	2019	1955	64
BNII	2015	1959	56
	2016	1959	57
	2017	1959	58
	2018	1959	59
	2019	1959	60
BNLI	2015	1955	60
	2016	1955	61
	2017	1955	62
	2018	1955	63
	2019	1955	64

Gambar 4.7

Grafik Deskriptif Umur Perusahaan Tahun 2015-2019

Pada grafik diatas dapat dilihat tingkat umur perusahaan dengan total sampel 8 perusahaan perbankan penelitian selama 5 tahun yang menunjukkan bahwa tingkat umur perusahaan selama periode penelitian yang memperoleh hasil tertinggi hanya perusahaan BBRI pada tahun 2015 sebesar 120, tahun 2016 sebesar 121, tahun 2017 sebesar 122, tahun 2018 sebesar 123 dan tahun 2019 sebesar 124. Selanjutnya posisi terendah hanya pada perusahaan BMRI selama periode penelitian pada tahun 2015 sebesar 16, tahun 2016 sebesar 17, tahun 2017 sebesar 18, tahun 2018 sebesar 19 dan tahun 2019 sebesar 20.

Tabel 4.14
Hasil Analisis Statistik Umur Perusahaan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AGE	40	16	124	63,75	26,941
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Ouput SPSS 22, Data yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa umur perusahaan (X7) dengan jumlah rata-rata sebesar 63,75 hal ini berarti bahwa

jumlah rata-rata umur perusahaan pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 yaitu 63 tahun sedangkan standar deviasi 26,941 atau sekitar 26 tahun. Jumlah minimum umur perusahaan adalah 16,00 atau 16 tahun terdapat pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tahun 2015 sedangkan jumlah maksimumnya adalah 124,00 atau 124 tahun yang terdapat pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tahun 2019.

h) Sustainable Finance Disclosure

Tabel 4.15
Kategori Sustainable Finance Tahun 2015-2019

	Kategori	2015	2016	2017	2018	2019	Average
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	5,97%	5,97%	5,97%	8,96%	11,94%	38,81%
2	Iktisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	59,70%	47,76%	55,22%	97,01%	113,43%	37,31%
3	Profil Singkat	98,51%	89,55%	104,48%	102,99%	107,46%	55,89%
4	Penjelasan Direksi	23,88%	32,84%	37,31%	86,57%	85,07%	26,57%
5	Tata Kelola Keberlanjutan	55,22%	44,78%	55,22%	67,16%	70,15%	48,76%
6	Kinerja Keberlanjutan	128,36%	111,94%	158,21%	252,24%	316,42%	32,24%
7	Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen (Jika Ada)	0,00%	0,00%	0,00%	4,48%	4,48%	8,96%
	Rata-rata SFD	53,09%	47,55%	59,49%	88,49%	101,28%	35,51%

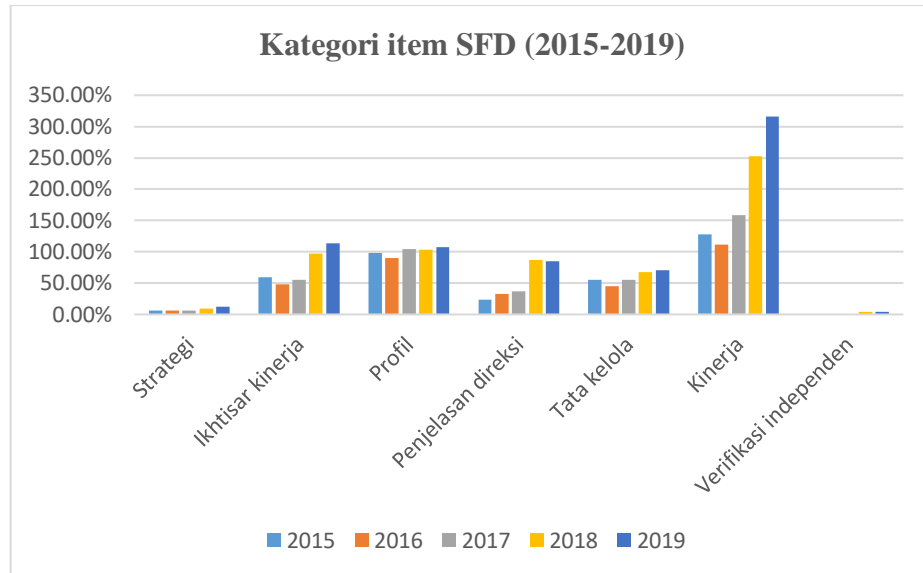
Sustainable finance (keuangan berkelanjutan) merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan

berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup (OJK, 2014:438). Program keuangan keberlanjutan ini meliputi 3 aspek yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup yang merupakan arah tujuan kesuksesan dalam pencapaian penerapan sustainable finance.

Tabel diatas menunjukkan hasil analisis statistik menggunakan presentase untuk variabel dependen yaitu *Sustainable Finance Disclosure* (SFD), yang memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 35,51%. Pengungkapan *sustainable finance* mengalami kenaikan di tahun 2015 dari 53,09% namun kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 47,55% dan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan secara signifikan. Tabel 18 menunjukkan bahwa pengungkapan profil singkat yang memiliki presentase paling tinggi sebesar 55,89% karena memaparkan penilaian penting dalam perusahaan dan penjelasan singkat mengenai rencana bisnis.

Tabel diatas juga menunjukkan pengungkapan *sustainable finance* terendah terjadi di tahun 2016 sebesar 47,55%. Hal ini dikarenakan masih terdapat perusahaan perbankan yang belum optimal sepenuhnya memaparkan pengungkapan *sustainable finance*. Selanjutnya pada kategori verifikasi tertulis dari pihak independen masih rendah yaitu sebesar 8,96%. Hal ini dikarenakan terdapat pernyataan dari pihak independen yang tidak di publikasikan pada publik.

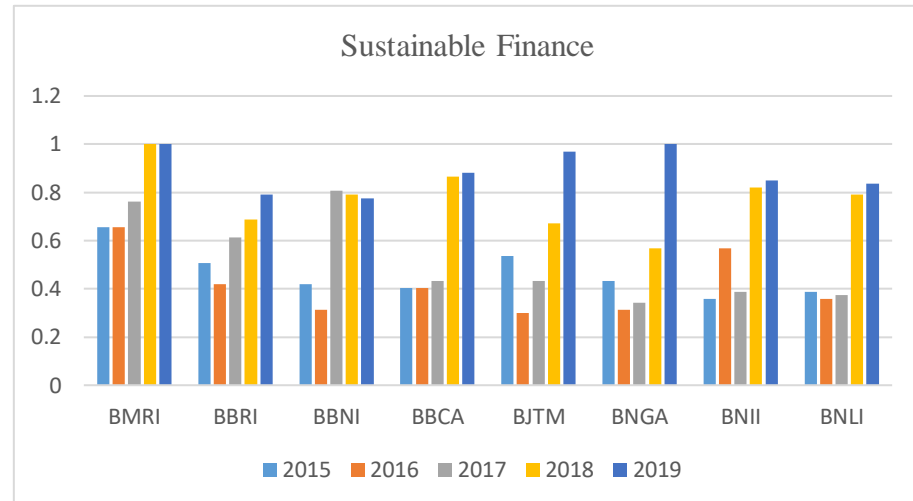
Gambar 4.8
Kategori Item Sustainable Finance Disclosure Tahun 2015-2019



Sumber : Data Yang Diolah 2020

Pada gambar diatas menjelaskan mengenai pengungkapan *sustainable finance* secara keseluruhan pada tahun 2015-2019. Beberapa indikator item menunjukkan peningkatan dan penurunan. Hasil grafik menunjukan bahwa kategori kinerja keberlanjutan memiliki peningkatan tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 316,42% sedangkan kategori variabel independen tahun 2015-2017 belum ada peningkatan dikarenakan masih tergolong tahap awal dari program *sustainable finance* sehingga tidak dilibatkan dalam pengungkapan.

Gambar 4.9
Grafik Deskriptif Sustainable Finance Tahun 2015-2019



Sumber : Data Yang Diolah 2020

Pada grafik diatas dapat diketahui tingkat pengungkapan sustainable finance dengan total sampel 8 perusahaan perbankan selama penelitian 5 tahun yang menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan sustainable finance tertinggi tahun 2015 pada perusahaan BMRI sebesar 0,66 dan posisi terendah perusahaan BNII sebesar 0,36. Tingkat tertinggi tahun 2016 perusahaan BMRI sebesar 0,66 dan posisi terendah tahun 2016 perusahaan BBNI sebesar 0,31. Tingkat tertinggi tahun 2017 perusahaan BBNI sebesar 0,81 dan posisi terendah perusahaan BNGA sebesar 0,34. Tingkat tertinggi tahun 2018 pada perusahaan BMRI sebesar 1,00 dan posisi terendah pada perusahaan BNGA sebesar 0,57. Tingkat tertinggi tahun 2019 pada perusahaan BMRI sebesar 1,00 dan kondisi terendah perusahaan BBNI sebesar 0,78.

Tabel 4.16
Hasil Analisis Statistik Sustainable Finance Disclosure

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SFD	40	,30	1,00	,6119	,22519
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Ouput SPSS 22, Data yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel dependen yaitu *sustainable finance* (Y) memiliki rata-rata 0,6119 atau 61,19% dari seluruh total *item* yang terdapat dalam POJK Nomor 51/ POJK.03/ 2017 dengan standar deviasi 0,22519 atau 22% hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan *sustainable finance* pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 ternyata masih rendah dan nilai minimum menunjukkan 0,30 atau 30% hal ini berarti bahwa masih ada perbankan yang belum lengkap dalam mengungkapkan sustainable finance yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) tahun 2016 selanjutnya untuk jumlah maksimum 1,00 atau 100% perbankan yang sudah lengkap mengungkapkan sustainable financenya yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tahun 2018 dan 2019 serta PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) tahun 2019.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik sebagai syarat kedua untuk penelitian suatu model regresi, suatu model regresi yang baik yang memenuhi asumsi klasik yaitu meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji

heteroskedastisitas. Berikut penjelasan uji asumsi klasik dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data yaitu dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorof Smirnov. Dalam hal ini untuk mengetahui berdistribusi normal atau tidak. Residual yang normal jika nilai signifikan $> 0,05$, jika $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.17
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,17597118
Most Extreme Differences	Absolute	,138
	Positive	,138
	Negative	-,094
Test Statistic		,138
Asymp. Sig. (2-tailed)		,184 ^c

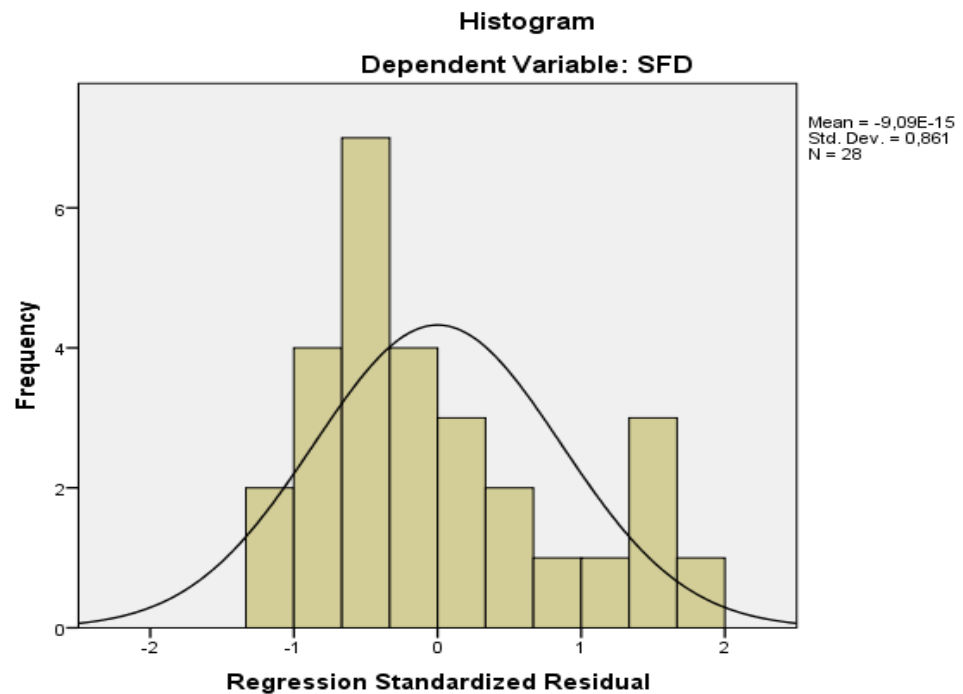
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

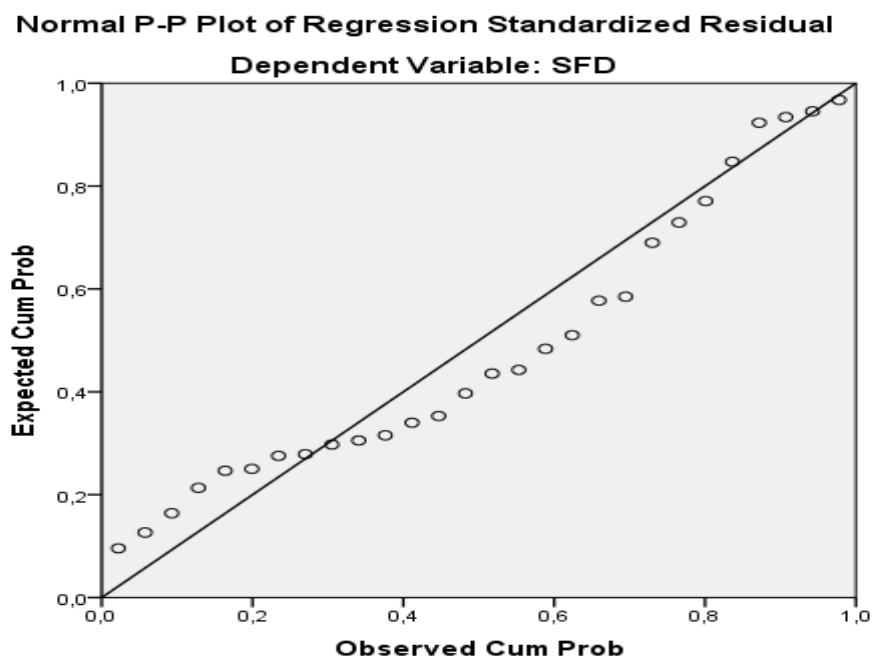
Sumber : Ouput SPSS 22, Data yang diolah 2020

Gambar 4.10
Histogram Uji Normalitas



Sumber : Ouput SPSS 22, Data yang diolah 2020

Gambar 4.11
Grafik P-Plot Of Regression Standardized Residual



Sumber : Ouput SPSS 22, Data yang diolah 2020

Berdasarkan gambar grafik histogram dan grafik normal p-plot of regression standardized residul menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal karena berbentuk lonceng, sedangkan pada grafik normal p-plot of regression standardized residul tertitik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dengan mengikuti garis, ini menunjukan pola distribusi normal. Maka dapat disimpulkan grafik histogram dan grafik normal p-plot of regression standardized residul berdistribusi normal.

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel-variabel yang akan digunakan dalam persamaan regresi dengan menghitung nilai tolerance dan VIF (*Varian Information Factors*). Batas nilai tolerance adalah 0,10 dan VIF adalah 10. Apabila nilai nilai tolerance kurang dari 0,10 atau VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolonieritas.

Tabel 4.18
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constan)	-4,448	1,958		-2,272	,034		
DD	-,053	,038	-,453	-1,382	,182	,262	3,822
KI	-,759	1,231	-,209	-,617	,544	,246	4,068
KA	,068	,070	,200	,975	,341	,672	1,489
TK	-,366	,128	-1,239	-2,864	,010	,150	6,657
AKO	-2,018	1,839	-,202	-1,097	,286	,832	1,202
SIZE	,434	,166	1,616	2,615	,017	,074	13,575
AGE	,012	,012	,250	,977	,340	,429	2,329

a. Dependent Variable: SFD

Sumber : Output SPSS 22, Data yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel dewan direksi memiliki nilai tolerance 0,262 dan nilai VIF 3,822; variabel komisar independen memiliki nilai tolerance 0,246 dan nilai VIF 4,068; variabel komite audit memiliki nilai tolerance 0,672 dan nilai VIF 1,489; variabel tekanan karyawan memiliki nilai tolerance 0,150 dan nilai VIF 6,657; variabel arus kas operasi memiliki nilai tolerance 0,832 dan nilai VIF 1,202; variabel ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance 0,074 dan nilai VIF 13,575 serta variabel umur perusahaan memiliki nilai tolerance 0,429 dan nilai VIF 2,329. Untuk variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat nilai yang tidak sesuai dengan persyaratan uji multikolinieritas sehingga dapat disimpulkan terjadi adanya multikolonieritas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018:137) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi adanya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka distribusi data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas. Tetapi sebaliknya, jika probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansinya 5% (0,05) maka distribusi data dikatakan terkena heteroskedstisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 4.19
Hasil Uji Heteroskedastisitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Uji_Gljaser
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,1414
	Std. Deviation	,10109
Most Extreme Differences	Absolute	,148
	Positive	,148
	Negative	-,089
Test Statistic		,148
Asymp. Sig. (2-tailed)		,120 ^c

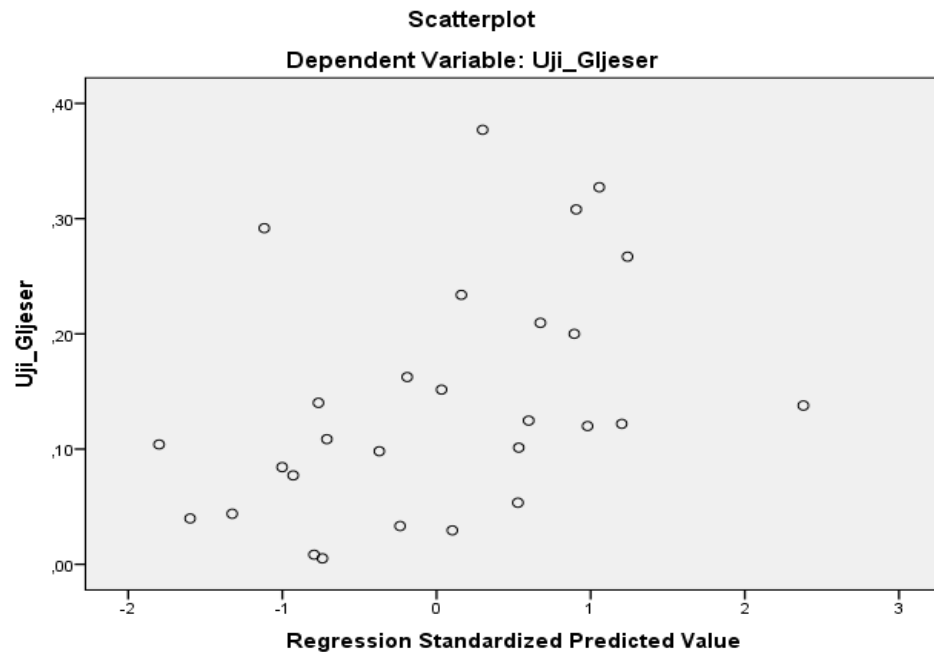
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output SPSS 22, Data yang diolah 2020

Gambar 4.12
Hasil Scatterplot Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS 22, Data yang diolah 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas memiliki nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,120 atau 12% dengan nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka dapat distribusi data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pada gambar uji gljeser, menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi, komisar independen, komite audit, tekanan karyawan, arus kas operasi, ukuran perusahaan dan umur perusahaan memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 atau 5%, maka model regresi penelitian ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi linear memiliki korelasi antara residual pada periode n dengan residual pada periode sebelumnya ($n - 1$). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.20
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,661 ^a	,437	,241	,20446	1,588

a. Predictors: (Constant), AGE, KA, AKO, DD, KI, TK, SIZE

b. Dependent Variable: SFD

Sumber : Output SPSS 22, Data yang diolah 2020

Berdasarkan hasil uji autokorelasi tabel 4.10 diperoleh nilai DW sebesar 1,588 nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel (n) sebanyak 28 dan jumlah variabel independen ($k=4$) 7 dengan nilai du sebesar 2,072 nilai 4- du sebesar 1,928. Hasilnya adalah $1,588 < 2,072 > 1,928$ oleh karena itu nilai DW 1,588 lebih kecil dari (du) 2,072 dan kurang dari (4- du) 1,928 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan tidak terjadi autokorelasi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel Independen Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Tekanan *Stakeholder*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap variabel dependen *Sustainable Finance*. Berikut ini adalah hasil dari regresi linier berganda :

Tabel 4.21
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,448	1,958		-2,272	,034
DD	-,053	,038	-,453	-1,382	,182
KI	-,759	1,231	-,209	-,617	,544
KA	,068	,070	,200	,975	,341
TK	-,366	,128	-1,239	-2,864	,010
AKO	-2,018	1,839	-,202	-1,097	,286
SIZE	,434	,166	1,616	2,615	,017
AGE	,012	,012	,250	,977	,340

a. Dependent Variable: SFD

Sumber : Output SPSS 22, Data yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil dari regresi linier berganda dengan nilai constant sebesar -4,448, nilai koefisien dewan direksi (DD) -0,053; nilai koefisien komisaris independen (KI) -0,759; nilai koefisien komite audit (KA) 0,068; nilai koefisien tekanan karyawan (TK) -0,366; nilai koefisien arus kas operasi (AKO) -2,018;

nilai koefisien ukuran perusahaan (SIZE) 0,434 dan nilai umur perusahaan (AGE) 0,012. Maka persamaan regresinya sebagai berikut :

$$\text{SFD} = -4,448 - 0,053 \text{ DD} - 0,759 \text{ KI} + 0,068 \text{ KA} - 0,366 \text{ TK} - 2,018 \text{ AKO} + 0,434 \text{ SIZE} + 0,012 \text{ AGE} + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilakukan analisis mengenai besarnya masing-masing pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) sebagai berikut :

1. Nilai konstan sebesar -4,448 artinya jika seluruh nilai variabel independen (X) yang meliputi dewan direksi, komisaris independen, komite audit, tekanan karyawan, arus kas operasi, ukuran perusahaan dan umur perusahaan bernilai nol, maka besarnya variabel *sustainable finance* bernilai 4,448.
2. Variabel dewan direksi memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,053 dan bertanda negatif dapat diartikan dewan direksi meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap maka *sustainable finance* akan menurun sebesar 0,053.
3. Variabel komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,759 dan bertanda negatif, hal ini menunjukkan apabila proporsi komisaris independen meningkat sebesar satu satuan maka dengan asumsi variabel lainnya tetap maka *sustainable finance* akan menurun sebesar 0,759.
4. Variabel komite audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,068 dan bertanda positif, hal ini menunjukkan apabila ukuran komite audit

- meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lainya tetap maka *sustainable finance* akan meningkat sebesar 0,068.
5. Variabel tekanan karyawan memiliki koefisien regresi sebesar -0,366 dan bertanda negatif, hal ini menunjukkan apabila tekanan karyawan meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lainya tetap maka *sustainable finance* akan menurun sebesar 0,366.
 6. Variabel arus kas operasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar -2,018 dan bertanda negatif, hal ini menunjukan apabila tekanan karyawan meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lainya tetap maka *sustainable finance* akan menurun sebesar 2,018.
 7. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,434, hal ini menunjukan apabila ukuran perusahaan meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lainya tetap maka *sustainable finance* akan meningkat sebesar 0,434.
 8. Variabel umur perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,012, hal ini menunjukan apabila umur perusahaan meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lainya tetap maka *sustainable finance* akan meningkat sebesar 0,012.

4. Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau penjelas secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Dalam penelitian ini, uji t dilakukan untuk menganalisis variabel independen yakni ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, tekanan karyawan, arus kas operasi, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap variabel dependen yakni *sustainable finance*. Pengujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95%. Hasil uji parsial penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.22
Hasil Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,448	1,958		-2,272	,034
DD	-,053	,038	-,453	-1,382	,182
KI	-,759	1,231	-,209	-,617	,544
KA	,068	,070	,200	,975	,341
TK	-,366	,128	-1,239	-2,864	,010
AKO	-2,018	1,839	-,202	-1,097	,286
SIZE	,434	,166	1,616	2,615	,017
AGE	,012	,012	,250	,977	,340

a. Dependent Variable: SFD

Sumber : Output SPSS 22, Data yang diolah 2020

Kriteria yang harus dipenuhi agar variabel independen secara individual dapat dikatakan mempengaruhi variabel dependen yaitu apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$. Langkah yang dilakukan untuk mencari t_{tabel} yaitu dengan rumus $t_{tabel} = t_{(\alpha/2; n-k-1)}$ dimana $\alpha = 0,05$; n menunjukkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 28; dan k menunjukkan jumlah variabel independen yaitu 5. Berdasarkan persamaan tersebut maka diperoleh nilai $t_{tabel} = t_{(0,025; 28)} = 2,048$.

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel diatas, hasil uji t untuk setiap variabel independen dapat diuraikan sebagai berikut :

1. H1 : Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *sustainable finance*

Nilai t hitung pada tabel diatas menunjukkan nilai -0,053 hal ini berarti $t_{hitung} -0,053 < t_{tabel} 2,048$. Nilai signifikansi pada variabel direksi menunjukkan nilai 0,182 atau lebih dari 0,05 dan koefisien beta menunjukkan nilai negatif. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa **Ho Diterima** yang berarti tidak ada pengaruh dewan direksi terhadap *sustainable finance* pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

2. H2 : Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *sustainable finance*

Nilai t hitung pada tabel diatas menunjukkan nilai -0,759 hal ini berarti $t \text{ hitung } -0,759 < t \text{ tabel } 2,048$. Nilai signifikansi pada variabel komisaris independen menunjukkan nilai 0,544 atau lebih dari 0,05 dan koefisien beta menunjukkan nilai negatif. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa **Ho Diterima** yang berarti tidak ada pengaruh komisaris independen terhadap *sustainable finance* pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

3. H3 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap *sustainable finance*

Nilai t hitung pada tabel diatas menunjukkan nilai 2,648 hal ini berarti $t \text{ hitung } 0,068 < t \text{ tabel } 2,048$. Nilai signifikansi pada variabel komite audit menunjukkan nilai 0,341 atau lebih dari 0,05 dan koefisien beta menunjukkan nilai positif. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa **Ho Diterima** yang berarti komite audit tidak ada pengaruh terhadap *sustainable finance* pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

4. H4 : Tekanan karyawan berpengaruh positif terhadap *sustainable finance*

Nilai t hitung pada tabel diatas menunjukkan nilai -0,366 hal ini berarti $t \text{ hitung } -0,366 < t \text{ tabel } 2,048$. Nilai signifikansi pada variabel tekanan karyawan menunjukkan nilai 0,010 atau kurang dari 0,05 atau 5% dan koefisien beta menunjukkan nilai negatif. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa **Ha Ditolak** yang berarti terdapat pengaruh tekanan karyawan terhadap *sustainable finance* pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

5. H5 : Arus kas Operasi berpengaruh negatif terhadap *sustainable finance*

Nilai t hitung pada tabel diatas menunjukkan nilai -2,018 hal ini berarti $t \text{ hitung } -2,018 < t \text{ tabel } 2,048$. Nilai signifikansi pada variabel arus kas operasi menunjukkan nilai 0,286 atau lebih dari 0,05 dan koefisien beta menunjukkan nilai negatif. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa **Ho Diterima**, yang berarti tidak adanya pengaruh arus kas operasi terhadap *sustainable finance* pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

6. H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *sustainable finance*

Nilai t hitung pada tabel diatas menunjukkan nilai 0,434 hal ini berarti $t \text{ hitung } 0,434 < t \text{ tabel } 2,048$. Nilai signifikansi pada variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai 0,017 atau kurang dari 0,05 dan koefisien beta menunjukkan nilai positif. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa **Ha Ditolak** yang berarti terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *sustainable finance* pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

7. H7 : Umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *sustainable finance*

Nilai t hitung pada tabel diatas menunjukkan nilai 0,012 hal ini berarti $t \text{ hitung } 0,012 < t \text{ tabel } 2,048$. Nilai signifikansi pada variabel umur perusahaan menunjukkan nilai 0,340 atau lebih dari 0,05 dan koefisien beta menunjukkan nilai positif. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa **Ho Diterima**, atau umur perusahaan berpengaruh terhadap *sustainable finance* pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

5. Uji Simultan (Uji F)

Uji Statistik F ini bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas atau independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau variabel dependen.

Tabel 4.23
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,650	7	,093	2,221	,076 ^b
Residual	,836	20	,042		
Total	1,486	27			

a. Dependent Variable: SFD

b. Predictors: (Constant), AGE, KA, AKO, DD, KI, TK, SIZE

Sumber : Output SPSS 22, Data yang diolah 2020

Syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan apakah variabel independen berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan signifikansi $< 0,05$. Nilai F_{tabel} dapat dihitung dengan rumus $F_{tabel} = F(k : (n-k))$ dimana k menunjukkan jumlah variabel independen yaitu 7 dan n menunjukkan jumlah sampel yaitu 28, maka persamaan yang didapat yaitu $F_{tabel} = F(7 : (28-7)) = 7:21$. Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa $F_{hitung} 2,221 < F_{tabel} 2,36$ dan nilai signifikan $0,076 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa dewan direksi, komisaris independen, komite audit, tekanan karyawan, arus kas operasi, ukuran perusahaan dan umur perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance* dan dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak layak atau not good fit.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh pengukuran model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

Tabel 4.24
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,661 ^a	,437	,241	,20446

a. Predictors: (Constant), AGE, KA, AKO, DD, KI, TK, SIZE

b. Dependent Variable: SFD

Sumber : Output SPSS 22, Data Yang Diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji koefisien determinasi R Square menunjukkan nilai sebesar 0,437 atau 43,7% yang berarti bahwa variabel dependen penelitian ini yaitu *sustainable finance* dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dewan direksi, komisaris independen, komite audit, tekanan karyawan, arus kas operasi, ukuran perusahaan dan umur perusahaan 43,7% sisanya sebesar 56,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi pada penelitian ini.

C. Pembahasan

Berdasarkan pengujian regresi linear berganda pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tekanan karyawan (TK) dan ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh signifikan terhadap *sustainable finance*. Sedangkan dewan direksi (DD), komisaris independen (KI), komite audit (KA), arus kas operasi (AKO) dan umur perusahaan (AGE) tidak memiliki pengaruh terhadap *sustainable finance*, maka pembahasan untuk masing-masing hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Sustainable Finance*

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance*. Hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien regresi dewan direksi sebesar -0,053 dengan nilai signifikan 0,182 lebih dari 0,05 atau ($0,182 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa direksi tidak memiliki pengaruh positif terhadap *sustainable finance*, yang berarti semakin banyak jumlah direksi dalam suatu perbankan maka akan menurunkan pengungkapan *sustainable finance* dalam suatu perbankan. Dewan direksi merupakan penentu dalam kebijakan dan tanggungjawab sebuah perusahaan dalam berbagai hal yang termasuk dalam penerapan *sustainable finance* dan pelaporan keuangan perusahaan (Soemarso, 2018:278). Hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian Ani dan Fredy (2017:444) serta Rahayu (2019:69) yakni perbankan merupakan suatu organisasi kompleks yang diharuskan tunduk pada berbagai peraturan yang diterapkan perusahaan,

maka jumlah direksi tidak berpengaruh dalam menangani beban kerja yang ditanggungnya termasuk dalam pelaporan.

Semakin dewan direksi berperan maka akan tidak efektif untuk mendorong penerapan pengungkapan *sustainable finance* di Indonesia. Jumlah dewan direksi yang terlalu banyak kurang optimal dalam penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan bank terkait kinerja sosial dan lingkungan yang telah dilakukan

2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Sustainable Finance*

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance*. Hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar -0,759 dan nilai signifikan 0,544 lebih dari 0,05 atau 5% ($0,544 > 0,05$). Dewan komisaris merupakan pengawas dalam perusahaan yang bertugas mengawasi perilaku manajemen dalam pelaksanaan strategi perusahaan serta memastikan perusahaan telah menerapkan GCG (Hery, 2017:23). Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *sustainable finance*. Hasil kesesuaian jumlah proporsi komisaris independen dalam suatu perbankan minimal 30% sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/ POJK.04/ 2014 tersebut ternyata tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap *sustainable finance* yang dilakukan oleh perbankan. Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian oleh Any dan Fredy (2017:445).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang ada dalam perbankan hanya untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam peraturan saja, sehingga proporsi dewan komisaris independen yang besar tidak menjamin pengungkapan *sustainable finance* yang tinggi. Kemungkinan lain juga karena banyak perusahaan perbankan yang belum memiliki komitmen dalam menerapkan *sustainable finance* dan kesalahan dalam pengangkatan komisaris independen. Kesalahan tersebut dapat pada pengawasan, pengendalian dan pengarahan oleh komisaris independen terhadap manajemen perusahaan yang tidak maksimal.

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Sustainable Finance*

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance*. Hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,068 dan nilai signifikan 0,341 lebih dari 0,05 atau 5% ($0,341 > 0,05$). Komite audit dapat meningkatkan peran pengawasannya pada proses pelaporan keuangan perusahaan, perancangan dan implementasi sistem pengendalian internal yang baik (Soemarso, 2018:289). Semakin banyak jumlah komite audit dalam perbankan dapat menurunkan tingkat pengungkapan *sustainable finance*. Komite audit biasanya terdiri dari 3 anggota serta sedapat mungkin anggota komite audit harus memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian oleh Rahayu

(2019:72). Jika semakin sedikit jumlah komite audit maka akan cenderung dapat bertindak lebih efisien dalam meningkatkan pengawasan dan pelaporan keuangan dan akutansi.

Keberadaan komite audit dapat membantu suatu perusahaan dalam menjamin sistem pengendalian perusahaan berjalan baik serta menjamin pengungkapan yang ada serta akan mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang transparan , akurat dan lengkap serta berintegritas yang tinggi.

4. Pengaruh Tekanan Karyawan Terhadap *Sustainable Finance*

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa tekanan karyawan berpengaruh terhadap *sustainable finance*. Hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar -0,366 dan nilai signifikan 0,010 kurang dari 0,05 atau 5% ($0,010 < 0,05$). *Stakeholder* (pemangku kepentingan) merupakan kewajiban dalam menjaga perusahaan agar tetap berjalan dengan lancar, dikelola dengan baik, penuh kehati-hatian dan penuh adanya tanggungjawab (Soemarso, 2018:565). Penelitian ini selaras dengan penelitian oleh Alfaiz (2019:125) dan Suharyani et al (2019:78). Tekanan karyawan dapat mempengaruhi transparansi laporan keberlanjutan. Semakin banyak jumlah pekerja maka akan semakin tinggi pula tingkat transparansi yang diminta. Karyawan termasuk dalam kategori *stakeholder* internal dalam menentukan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan suatu perusahaan.

Pengungkapan dalam perusahaan sangat penting karena pada kondisi ketidakpastian pasar dan nilai informasi tercemar didalamnya. Informasi tersebut harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan serta transparansi dalam pelaporan keuangan harus keterbukaan informasi sehingga bisa dipahami oleh publik yang berkepentingan.

5. Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap *Sustainable Finance*

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance*. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai koefisien regresi sebesar -2,018 dan nilai signifikan 0,286 lebih dari 0,05 atau 5% ($0,286 > 0,05$). Arus kas (*cash flow*) adalah arus masuk (*inflow*) dan arus keluar (*cash flow*) kas dan setara kas (Prastowo, 11:30). Arus kas operasi yang baik adalah yang bersaldo positif yang menunjukkan bahwa perusahaan cenderung lebih banyak melakukan transaksi penerimaan kas dibandingkan pengeluaran kas. Ketersediaan arus kas operasi dalam jumlah yang maksimal dan dikelola dengan baik akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yakni Cardilla et al (2019:77) yang menyatakan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena kurangnya kapasitas atau kemampuan perusahaan dalam pengungkapan program *sustainable finance* kurang efektif. Pernyataan tersebut juga dibuktikan dengan perbankan yang memiliki arus kas yang

negatif yaitu BBRI tahun 2018 sebesar (4,274,095) dan 2019 sebesar (12,611,042) ; BJTM tahun 2016 sebesar (1.132.088) ; BNGA tahun 2018 sebesar (749,516) ; BNII tahun 2016 sebesar (4.730.653), 2017 sebesar (3.996.679) dan 2018 sebesar (7.336.519) ; BNLI tahun 2017 sebesar (13.394.147), 2018 sebesar (4.698.941) dan 2019 sebesar (1.879.571).

Hal tersebut dapat mengidentifikasi bahwa masih terdapat perbankan dalam penelitian ini yang memiliki arus kas operasi negatif sehingga tidak menjamin adanya pengungkapan *sustainable finance* yang tinggi akibatnya laporan arus kas operasi yang negatif ini dapat mengurangi minat para investor untuk tertarik membeli saham pada perusahaan mereka.

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Sustainable Finance*

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *sustainable finance*. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,434 dengan nilai signifikan 0,017 kurang dari 0,05 atau 5% ($0,017 < 0,05$). Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dinilai dari nilai total aset perusahaan (Hery, 2017:17) . Investor akan lebih tertarik dan memperhatikan pada perusahaan dengan melihat ukuran dari suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin dikenal oleh masyarakat luas sehingga lebih mudah untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh Any dan Fredy (2019:445), Rianasari P (2016:12) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainable finance*. Ukuran perusahaan yang besar akan meningkatkan *sustainable finance*. Hal ini kemungkinan perusahaan besar telah meningkatkan kapasitas operasionalnya serta pelaporan aspek sosial dan lingkungannya.

7. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap *Sustainable Finance*

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance*. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai koefisien regresi sebesar 0,012 dengan nilai signifikan 0,340 lebih dari 0,05 atau 5% ($0,340 > 0,05$). Menurut Utami (2011:108) menyatakan bahwa umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan. Pernyataan ini tidak selaras dengan penelitian terdahulu yakni Cardilla et al (2019:77) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap kualitas *sustainability report* untuk kelangsungan dan perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. Umur perusahaan tidak bisa dijadikan pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi karena investor tidak melihat seberapa lama perusahaan tersebut berdiri akan tetapi perusahaan akan lebih tertarik dengan total aset yang dimiliki perusahaan, kualitas perusahaan dan kinerja perusahaan.

8. Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Tekanan Karyawan, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap *Sustainable Finance*

Berdasarkan hasil uji statistik f dari variabel dewan direksi, komisaris independen, komite audit, tekanan karyawan, arus kas operasi, ukuran perusahaan dan umur perusahaan diperoleh dari nilai signifikan sebesar $0,076 > 0,05$ yang berarti bahwa variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dan dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak layak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah pengungkapan sustainable finance yang masih merupakan isu baru dan belum sepenuhnya optimal sehingga perbankan dapat berkomitmen untuk segera menerapkannya yang meliputi tiga aspek yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup karena berkaitan dengan tanggungjawab perusahaan dalam penerapan keuangan keberlanjutan di sektor keuangan khususnya perbankan serta *stakeholder* yang ada, sehingga memerlukan penyelesaian yang tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diolah oleh peneliti mengenai “Analisis Dampak Mekanisme Governance, Tekanan *Stakeholder*, Arus Kas Operasi, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap *Sustainable Finance* Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
4. Tekanan karyawan berpengaruh terhadap *sustainable finance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

5. Arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
6. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *sustainable finance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
7. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
8. Dewan direksi, komite audit, tekanan karyawan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *sustainable finance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Bagi para pelaku investor yang akan menanamkan sahamnya untuk mempertimbangkan terlebih dahulu karena terbukti bahwa variabel dewan direksi, komisaris independen, komite audit, arus kas operasi dan umur perusahaan tidak memiliki hubungan dengan *sustainable finance*, namun variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada sektor perbankan dan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan sustainable finance.
3. Bagi penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan tahun penelitian dan sampel dalam penelitian.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang akan menjadi arah bagi penelitian selanjutnya yaitu masih belum semua perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keberlanjutannya (*sustainability report*) karena tahun 2015 merupakan tahap awal dalam pengungkapan sustainable finance dan berdasarkan hasil uji R-Squared hanya mampu menjelaskan variabel pengungkapan *sustainable finance* sebesar 43,7% sisanya sebesar 56,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ani S, M. (2017). *Mekanisme Governance Dan Pengungkapan Sustainable Finance: Untuk Melihat Tingkat Kesiapan Penerapan Sustainable Finance Pada Perusahaan Jasa Keuangan Terdaftar Di BEI*. Jurnal Akuntansi/ Volume XXI, No 03, 437-447.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=mekanisme+governance+dan+pengungkapan+sustainable+finance+%3A+untuk+melihat+tingkat+kesiapan+penerapan+sustainable+finance+pada+perusahaan+jasa+keuangan+terdaftar+di+BEI&btnG=

Ardianto, E, M. (2011). *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Badan Pusat Statistik. (2013). *Statistik Indonesia 2013*. BPS. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

Berkelanjutan, T. P. (2014). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia (Roadmap For Sustainable Finance in Indonesia)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B, Pige`. (2002). *Stakeholder Theory and Corporate Governance: The Nature of The Board Information. Management*, Vol. 7, Pp: 1-7.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Stakeholder+theory+and+corporate+governance%3A+the+nature+of+the+board+information&btnG=

Chin (2000), Shaw (2003). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 8, No. 1.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Good+Corporate+Governance+dan+Penerapannya+di+Indonesia&btnG=

- Daniri, A. (2005). *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). *The Stakeholder Theory Of The Corporation: Concepts, Evidence, And Implications*. *Academy Of Management Review*. <https://doi.org/10.5465/Amr.1995.9503271992>
- Fitri Prasetyorini, B. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*.
- Galbreath, J. (2006). *Does primary stakeholder management positively affect the bottom line? Some evidence from Australia*. *Management Decision*. <https://doi.org/10.1108/00251740610690649>
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 25*. Edisi 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governance, K. N. (2012). *Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*.
- Hadad, M. D. (2015). *Sustainable Financing Industri Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hamdani. (2018). *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hery. (2016). *Mengenal Dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi: Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cetakan ke 17. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keuangan, O. J. (2014). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Munasinghe, M. (1992). *Climate Change and Sustainable Development Analysing the Linkages with Sustanomics*. Colombo, Srilangka: Munasinghe Institute for Development (MIND).
- Neuman, W. (20003). *Sosial Reserch Methods, Qualitative and Quantitative Approach*. New York: AB, Buston.
- Prastowo Dwi, D. (2011). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Edisi 3. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Rahayu. (2019). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Sustainable Finance Disclosure Pada Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017*. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Hal 15-50.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/75123/Pengaruh-mekanisme-corporate-governance-terhadap-sustainable-finance-disclosure-pada-perbankan-yang-terdaftar-di-BEI-tahun-2015-2017>

Rohmawati, Y, S. (2017). Pengaruh Arus Kas Operasi Dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Laba Usaha (Studi Kasus PT. Unilever Tbk). Jurnal akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, Vol. 11 No. 1 April 2017.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+ arus+kas+operasi+dan+hutang+jangka+panjang+terhadap+laba+usaha& btnG=

Rudyanto, A., & Siregar, S. V. (2017). *The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the sustainability report quality. International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2017-0071>

Sembiring, E. (2006). Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). *A survey of corporate governance. Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>

Simamora, S. (2019). Implementasi Pelaporan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) Di PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Jurnal Ilmiah M-Progress Vol. 9, No. 1, 32-50.

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/view/267>

Subagyo, P. D. (2005). Statistika Induktif Edisi 5. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke 16. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 23. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharyani, U. J. (2019). Pengaruh Tekanan *Stakeholder* Dan *Corporate Governance* Terhadap Kualitas *Sustainability Report*. *Jurnal Akademi Akuntansi*, Volume 2, No.1, Hal. 71-91.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+tekanan+stakeholder+dan+corporate+governance+terhadap+kualitas+sustainability+report&btnG=

Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Edisi 1. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Soemarso. (2018). *Etika Dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Thomsen, S., Pedersen, T., & Kvist, H. K. (2006). *Blockholder ownership: Effects on firm value in market and control based governance systems*. *Journal of Corporate Finance*.

<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.03.001>

Utami, D. (2011). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Umur Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh+kepemilikan+publik%2C+ukuran+dewan+komisaris%2C+profitabilitas+dan+umur+perusahaan+terhadap+pengungkapan+tanggung+jawab+sosial+perusahaan&btnG=

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasi Disertasi Panduan Eviews*. Edisi ke 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wijayanti, N. (2009). Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu pelaporan Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia). Universitas Sebelas Maret Surakarta.

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Profitabilitas%2C+Umur+Perusahaan%2C+Ukuran+Perusahaan%2C+Dan+Kepemilikan+Publik+Terhadap+Ketepatan+Waktu+Pelaporan++K+euangan+Perusahaan+%28Studi+Empiris+Pada+Perusahaan+LQ+45+di+Bursa+Efek+Indonesia%29&btnG=

Zarkasyi, W. (2018). *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya. Edisi 1. Bandung: CV. Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Data Populasi Perbankan Tahun 2015-2019

No	Kode	Nama Emiten
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
2	AGRS	Bank Agris Tbk
3	ARTO	Bank Artos Indonesia Tbk
4	BABP	Bank MNC Internasional Tbk
5	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk
6	BBCA	Bank Central Asia Tbk
7	BBHI	Bank Harda Internasional Tbk
8	BBKP	Bank Bukopin Tbk
9	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk
10	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
11	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
12	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
13	BBYB	Bank Yudha Bhakti Tbk
14	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk
15	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
16	BGTG	Bank Ganesha Tbk
17	BINA	Bank Ina Perdana Tbk
18	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk
19	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
20	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk
21	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk
22	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
23	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk
24	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
25	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk
26	BNLI	Bank Permata Tbk
27	BRIS	Bank BRI Syariah Tbk
28	BSIM	Bank Sinarmas Tbk
29	BSWD	Bank Of India Indonesia Tbk
30	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
31	BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
32	BVIC	Bank Victoria International Tbk
33	DNAR	Bank Dinar Indonesia Tbk
34	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk
35	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk
36	MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
37	MEGA	Bank Mega Tbk
38	NISP	Bank OCBC NISP Tbk
39	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk
40	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
41	PNBS	Bank Panin Dubai Syariah Tbk
42	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

Lampiran 2
Daftar Sampel Perbankan Tahun 2015-2019

No	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
4	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk
5	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
6	BNGA	PT Bank CIMB Niaga Tbk
7	BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
8	BNLI	Bank Permata Tbk

Sumber : Data yang diolah 2020

Lampiran 3
Hasil Perhitungan Semua Variabel Penelitian tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Dewan Direksi	Komisaris Independen	Komite Audit	Tekanan Karyawan	Arus Kas Operasi	Ukuran Perusahaan	Umur Perusahaan	SFD
BMRI	2015	11	0,50	5	10,51	0,046	20,63	16	0,672
	2016	10	0,50	6	10,57	0,010	20,76	17	0,657
	2017	10	0,50	6	10,55	0,004	20,84	18	0,761
	2018	11	0,50	6	10,59	0,027	20,91	19	1,000
	2019	12	0,50	7	10,57	0,018	21,00	20	1,000
BBRI	2015	11	0,63	4	10,91	0,052	20,59	120	0,507
	2016	11	0,56	6	10,98	0,022	20,73	121	0,418
	2017	11	0,56	6	11,01	0,035	20,84	122	0,612
	2018	12	0,56	6	11,01	0,044	20,98	123	0,687
	2019	12	0,56	7	11,03	0,031	21,07	124	0,791
BBNI	2015	9	0,63	4	10,20	0,048	20,05	69	0,418
	2016	10	0,63	3	10,25	0,027	20,22	70	0,313
	2017	10	0,50	4	10,23	0,047	20,38	71	0,806
	2018	11	0,56	4	10,21	0,005	20,51	72	0,791
	2019	11	0,63	4	10,21	0,015	20,56	73	0,776
BBCA	2015	10	0,60	3	10,12	0,050	20,20	59	0,403
	2016	11	0,60	3	10,18	0,064	20,33	60	0,403
	2017	11	0,60	3	10,20	0,013	20,44	61	0,433
	2018	12	0,60	3	10,22	0,006	20,53	62	0,866
	2019	11	0,60	3	10,16	0,057	20,64	63	0,881
BJTM	2015	5	0,40	3	8,13	0,074	17,57	54	0,537
	2016	5	0,40	3	8,14	0,026	17,58	55	0,299
	2017	7	0,40	4	8,30	0,129	17,76	56	0,433
	2018	7	0,50	4	8,34	0,150	17,95	57	0,672
	2019	5	0,50	4	8,36	0,030	18,16	58	0,955
BNGA	2015	11	0,50	6	9,52	0,028	19,29	60	0,433
	2016	10	0,50	4	9,49	0,014	19,30	61	0,313
	2017	11	0,44	4	9,46	0,076	19,40	62	0,343
	2018	12	0,57	4	9,43	0,003	19,40	63	0,567
	2019	11	0,50	4	9,33	0,008	19,43	64	1,000
BNII	2015	9	0,50	4	8,91	0,054	18,88	56	0,358
	2016	8	0,50	4	8,84	0,028	18,93	57	0,567
	2017	7	0,50	3	8,81	0,023	18,97	58	0,388
	2018	8	0,50	3	7,94	0,041	18,99	59	0,821
	2019	8	0,50	3	7,89	0,036	18,95	60	0,851
BNLI	2015	10	0,50	3	8,97	0,010	19,02	60	0,388
	2016	10	0,50	4	8,92	0,032	18,92	61	0,358
	2017	9	0,50	3	8,93	0,090	18,81	62	0,388
	2018	8	0,50	4	8,87	0,031	18,85	63	0,791
	2019	8	0,50	4	8,87	0,012	18,90	64	0,836

Lampiran 4
Hasil Perhitungan Dewan Direksi Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Ukuran Dewan Direksi
BMRI	2015	11
	2016	10
	2017	10
	2018	11
	2019	12
BBRI	2015	11
	2016	11
	2017	11
	2018	12
	2019	12
BBNI	2015	9
	2016	10
	2017	10
	2018	11
	2019	11
BBCA	2015	10
	2016	11
	2017	11
	2018	12
	2019	11
BJTM	2015	5
	2016	5
	2017	7
	2018	7
	2019	5
BNGA	2015	11
	2016	10
	2017	11
	2018	12
	2019	11
BNII	2015	9
	2016	8
	2017	7
	2018	8
	2019	8
BNLI	2015	10
	2016	10
	2017	9
	2018	8
	2019	8

Lampiran 5
Hasil Perhitungan Komisaris Independen Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Komisaris Independen	Proporsi Komisaris Independen
BMRI	2015	8	4	0,50
	2016	8	4	0,50
	2017	8	4	0,50
	2018	8	4	0,50
	2019	8	4	0,50
BBRI	2015	8	5	0,63
	2016	9	5	0,56
	2017	9	5	0,56
	2018	9	5	0,56
	2019	9	5	0,56
BBNI	2015	8	5	0,63
	2016	8	5	0,63
	2017	8	4	0,50
	2018	9	5	0,56
	2019	8	5	0,63
BBCA	2015	5	3	0,60
	2016	5	3	0,60
	2017	5	3	0,60
	2018	5	3	0,60
	2019	5	3	0,60
BJTM	2015	5	2	0,40
	2016	5	2	0,40
	2017	5	2	0,40
	2018	4	2	0,50
	2019	6	3	0,50
BNGA	2015	8	4	0,50
	2016	8	4	0,50
	2017	9	4	0,44
	2018	7	4	0,57
	2019	8	4	0,50
BNII	2015	6	3	0,50
	2016	6	3	0,50
	2017	6	3	0,50
	2018	6	3	0,50
	2019	6	3	0,50
BNLI	2015	8	4	0,50
	2016	8	4	0,50
	2017	8	4	0,50
	2018	8	4	0,50
	2019	8	4	0,50

Lampiran 6
Hasil Perhitungan Komite Audit Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Jumlah Komite Audit
BMRI	2015	5
	2016	6
	2017	6
	2018	6
	2019	7
BBRI	2015	4
	2016	6
	2017	6
	2018	6
	2019	7
BBNI	2015	4
	2016	3
	2017	4
	2018	4
	2019	4
BBCA	2015	3
	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
BJTM	2015	3
	2016	3
	2017	4
	2018	4
	2019	4
BNGA	2015	6
	2016	4
	2017	4
	2018	4
	2019	4
BNII	2015	4
	2016	4
	2017	3
	2018	3
	2019	3
BNLI	2015	3
	2016	4
	2017	3
	2018	4
	2019	4

Lampiran 7
Hasil Perhitungan Tekanan Karyawan Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Jml Karyawan	<i>Ln</i> Tekanan Karyawan
BMRI	2015	36.737	10,51
	2016	38.940	10,57
	2017	38.307	10,55
	2018	39.809	10,59
	2019	39.065	10,57
BBRI	2015	54.859	10,91
	2016	58.885	10,98
	2017	60.683	11,01
	2018	60.553	11,01
	2019	61.768	11,03
BBNI	2015	26.875	10,20
	2016	28.390	10,25
	2017	27.803	10,23
	2018	27.224	10,21
	2019	27.211	10,21
BBCA	2015	24.814	10,12
	2016	26.364	10,18
	2017	26.962	10,20
	2018	27.561	10,22
	2019	25.877	10,16
BJTM	2015	3.405	8,13
	2016	3.446	8,14
	2017	4.042	8,30
	2018	4.186	8,34
	2019	4.252	8,36
BNGA	2015	13.577	9,52
	2016	13.185	9,49
	2017	12.782	9,46
	2018	12.461	9,43
	2019	11.326	9,33
BNII	2015	7.421	8,91
	2016	6.908	8,84
	2017	6.727	8,81
	2018	2.820	7,94
	2019	2.670	7,89
BNLI	2015	7.892	8,97
	2016	7.499	8,92
	2017	7.542	8,93
	2018	7.125	8,87
	2019	7.120	8,87

Lampiran 8
Hasil Perhitungan Arus Kas Operasi Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Arus Kas Operasi	Total Aset	Rata-rata Arus Kas Operasi
BMRI	2015	10.201.454	910.063.409	0,046
	2016	41.521.119	1.038.706.009	0,010
	2017	4.952.703	1.124.700.847	0,004
	2018	31.962.470	1.202.252.094	0,027
	2019	23.967.890	1.318.246.335	0,018
BBRI	2015	45.544.908	878.426.312	0,052
	2016	21.770.833	1.003.644.426	0,022
	2017	39.299.109	1.127.447.489	0,035
	2018	57.355.295	1.296.898.292	0,044
	2019	44.583.078	1.416.758.840	0,031
BBNI	2015	24.356.628	508.595.288	0,048
	2016	15.999.051	603.031.880	0,027
	2017	33.625.853	709.330.084	0,047
	2018	4.274.095	808.572.011	0,005
	2019	12.611.042	845.605.208	0,015
BBCA	2015	29.459.026	594.372.770	0,050
	2016	43.473.049	676.738.753	0,064
	2017	9.658.627	750.319.671	0,013
	2018	4.912.562	824.787.944	0,006
	2019	51.942.040	918.989.312	0,057
BJTM	2015	3.150.353	42.803.631	0,074
	2016	1.132.088	43.032.950	0,026
	2017	6.663.420	51.518.681	0,129
	2018	9.427.320	62.689.118	0,150
	2019	2.337.757	76.715.290	0,030
BNGA	2015	6.755.174	238.849.252	0,028
	2016	3.291.332	241.571.728	0,014
	2017	20.129.300	266.305.445	0,076
	2018	749.516	266.781.498	0,003
	2019	2.070.946	274.467.227	0,008
BNII	2015	8.496.395	157.619.013	0,054
	2016	4.730.653	166.678.902	0,028
	2017	3.996.679	173.253.491	0,023
	2018	7.336.519	177.532.858	0,041
	2019	6.099.537	169.082.830	0,036
BNLI	2015	1.808.383	182.689.351	0,010
	2016	5.333.310	165.527.512	0,032
	2017	13.394.147	148.328.370	0,090
	2018	4.698.941	152.892.866	0,031
	2019	1.879.571	161.451.259	0,012

Lampiran 9
Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Total Aset	<i>Ln Total Aset (Size)</i>
BMRI	2015	910.063.409	20,63
	2016	1.038.706.009	20,76
	2017	1.124.700.847	20,84
	2018	1.202.252.094	20,91
	2019	1.318.246.335	21,00
BBRI	2015	878.426.312	20,59
	2016	1.003.644.426	20,73
	2017	1.127.447.489	20,84
	2018	1.296.898.292	20,98
	2019	1.416.758.840	21,07
BBNI	2015	508.595.288	20,05
	2016	603.031.880	20,22
	2017	709.330.084	20,38
	2018	808.572.011	20,51
	2019	845.605.208	20,56
BBCA	2015	594.372.770	20,20
	2016	676.738.753	20,33
	2017	750.319.671	20,44
	2018	824.787.944	20,53
	2019	918.989.312	20,64
BJTM	2015	42.803.631	17,57
	2016	43.032.950	17,58
	2017	51.518.681	17,76
	2018	62.689.118	17,95
	2019	76.715.290	18,16
BNGA	2015	238.849.252	19,29
	2016	241.571.728	19,30
	2017	266.305.445	19,40
	2018	266.781.498	19,40
	2019	274.467.227	19,43
BNII	2015	157.619.013	18,88
	2016	166.678.902	18,93
	2017	173.253.491	18,97
	2018	177.532.858	18,99
	2019	169.082.830	18,95
BNLI	2015	182.689.351	19,02
	2016	165.527.512	18,92
	2017	148.328.370	18,81
	2018	152.892.866	18,85
	2019	161.451.259	18,90

Lampiran 10
Hasil Perhitungan Umur Perusahaan Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Tahun Berdiri	Umur (Age)
BMRI	2015	1999	16
	2016	1999	17
	2017	1999	18
	2018	1999	19
	2019	1999	20
BBRI	2015	1895	120
	2016	1895	121
	2017	1895	122
	2018	1895	123
	2019	1895	124
BBNI	2015	1946	69
	2016	1946	70
	2017	1946	71
	2018	1946	72
	2019	1946	73
BBCA	2015	1956	59
	2016	1956	60
	2017	1956	61
	2018	1956	62
	2019	1956	63
BJTM	2015	1961	54
	2016	1961	55
	2017	1961	56
	2018	1961	57
	2019	1961	58
BNGA	2015	1955	60
	2016	1955	61
	2017	1955	62
	2018	1955	63
	2019	1955	64
BNII	2015	1959	56
	2016	1959	57
	2017	1959	58
	2018	1959	59
	2019	1959	60
BNLI	2015	1955	60
	2016	1955	61
	2017	1955	62
	2018	1955	63
	2019	1955	64

Lampiran 11
Hasil Perhitungan Sustainable Finance Disclosure Tahun 2015-2019

Kode Emiten	Tahun	Item Diungkapkan	Jumlah Item Yang Diungkapkan	Rata-rata SFD
BMRI	2015	45	67	0,672
	2016	44	67	0,657
	2017	51	67	0,761
	2018	67	67	1,000
	2019	67	67	1,000
BBRI	2015	34	67	0,507
	2016	28	67	0,418
	2017	41	67	0,612
	2018	46	67	0,687
	2019	53	67	0,791
BBNI	2015	28	67	0,418
	2016	21	67	0,313
	2017	54	67	0,806
	2018	53	67	0,791
	2019	52	67	0,776
BBCA	2015	27	67	0,403
	2016	27	67	0,403
	2017	29	67	0,433
	2018	58	67	0,866
	2019	59	67	0,881
BJTM	2015	36	67	0,537
	2016	20	67	0,299
	2017	29	67	0,433
	2018	45	67	0,672
	2019	64	67	0,955
BNGA	2015	29	67	0,433
	2016	21	67	0,313
	2017	23	67	0,343
	2018	38	67	0,567
	2019	67	67	1,000
BNII	2015	24	67	0,358
	2016	38	67	0,567
	2017	26	67	0,388
	2018	55	67	0,821
	2019	57	67	0,851
BNLI	2015	26	67	0,388
	2016	24	67	0,358
	2017	26	67	0,388
	2018	53	67	0,791
	2019	56	67	0,836

Lampiran 12
Perhitungan Item SFD Perbankan Tahun 2015-2019

Indikator (<i>item</i>) Sustainable Finance Disclosure		BMRI					BBRI				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Penjelasan strategi keberlanjutan		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Iktisar kinerja aspek keberlanjutan											
Aspek ekonomi	Kuantitas produksi atau jasa	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	pendapatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	laba atau rugi bersih	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	produk ramah lingkungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pelibatan pihak lokal	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
Aspek lingkungan hidup	penggunaan energi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pengurangan emisi	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
	pengurangan limbah dan efluen	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
	pelestarian keanekaragaman hayati	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
Aspek sosial	dampak positif dan negatif dari penerapan keuangan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
profil singkat											
	visi, misi, dan nilai keberlanjutan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

Skala usaha	total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase kepemilikan saham	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	wilayah operasional	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	penjelasan singkat produk, layanan dan kegiatan usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	keanggotaan asosiasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	perubahan LJK, emiten dan perusahaan publik bersifat signifikan	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
penjelasan direksi											
Kebijakan merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan	penjelasan nilai keberlanjutan	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	penjelasan respon LJK, emiten dan perusahaan terhadap isu terkait penerapan keuangan berkelanjutan	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
	Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
	tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0

Penerapan keuangan berkelanjutan	Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
	Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Strategi pencapaian target	Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, emiten dan perusahaan publik	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
tata kelola keberlanjutan											
Penjelasan mengenai pemangku kepentingan	Uraian tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat atau unit kerja yang penanggungjawab penerapan keuangan berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

	Penjelasan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota dewan komisaris, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggungjawab penerapan keuangan berkelanjutan	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	Penjelasan prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
	keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian manajemen, RUPS dan surat keputusan	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	pendekatan yang dilakukan LJK, emiten atau perusahaan publik melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan keuangan berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
kinerja keberlanjutan											
	penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK atau emiten	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1

	(masyarakat) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
	(masyarakat) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(masyarakat) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
	uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
	(penggunaan energi) jumlah dan intensitas energi yang digunakan	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
	(penggunaan energi) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup	Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
	informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
	(keanekaragaman hayati) dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
	(keanekaragaman hayati) upaya konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
	(emisi) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
	(emisi) upaya dan pencapaian pengurangan emisi	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
	(limbah dan efluen) jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
	(limbah dan efluen) mekanisme pengelolaan limbah dan efluen	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
	(limbah dan efluen) tumpahan yang terjadi (jika ada)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1

	jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
Tanggung jawab pengembangan Produk atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
	dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1
	jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1
	survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada)		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Jumlah		45	44	51	67	67	34	28	41	46	53
SFD (sustainable financ disclosure)		0,67	0,66	0.76	1,00	1	0,51	0,42	0,61	0,69	0,79
Persentase (%) SFD		67%	66%	76%	100%	100%	51%	42%	61%	69%	79%

	tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
Penerapan keuangan berkelanjutan	Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
Strategi pencapaian target	Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, emiten dan perusahaan publik	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
tata kelola keberlanjutan											
Penjelasan mengenai pemangku kepentingan	Uraian tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat atau unit kerja yang penanggungjawab penerapan keuangan berkelanjutan	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1

	Penjelasan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota dewan komisaris, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggungjawab penerapan keuangan berkelanjutan	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	Penjelasan prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian manajemen, RUPS dan surat keputusan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pendekatan yang dilakukan LJK, emiten atau perusahaan publik melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan keuangan berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
kinerja keberlanjutan											
	penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK atau emiten	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1

[illegible]

	(masyarakat) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
	(masyarakat) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	(masyarakat) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
	uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
	(penggunaan energi) jumlah dan intensitas energi yang digunakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(penggunaan energi) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan	Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1

Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup	informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
	(keanekaragaman hayati) dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
	(keanekaragaman hayati) upaya konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
	(emisi) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	(emisi) upaya dan pencapaian pengurangan emisi	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
	(limbah dan efluen) jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	(limbah dan efluen) mekanisme pengelolaan limbah dan efluen	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
	(limbah dan efluen) tumpahan yang terjadi (jika ada)	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1

	jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1
Tanggung jawab pengembangan Produk atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
	jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
	jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah		28	21	54	53	52	27	27	29	58	59
SFD (sustainable financ disclosure)		0,42	0,31	0,81	0,79	0,78	0,40	0,40	0,43	0,87	0,88
Persentase (%) SFD		42%	31%	81%	79%	78%	40%	40%	43%	87%	88%

[illegible]

Skala usaha	total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase kepemilikan saham	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	wilayah operasional	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	penjelasan singkat produk, layanan dan kegiatan usaha	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	keanggotaan asosiasi	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	perubahan LJK, emiten dan perusahaan publik bersifat signifikan	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
penjelasan direksi											
Kebijakan merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan	penjelasan nilai keberlanjutan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
	penjelasan respon LJK, emiten dan perusahaan terhadap isu terkait penerapan keuangan berkelanjutan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	Penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1

	Penjelasan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota dewan komisaris, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggungjawab penerapan keuangan berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	Penjelasan prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
	keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian manajemen, RUPS dan surat keputusan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pendekatan yang dilakukan LJK, emiten atau perusahaan publik melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan keuangan berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
kinerja keberlanjutan											
	penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK atau emiten	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1

	(masyarakat) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
	(masyarakat) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1
	(masyarakat) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
	uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	(penggunaan energi) jumlah dan intensitas energi yang digunakan	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
	(penggunaan energi) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1

Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup	Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	(keanekaragaman hayati) dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	(keanekaragaman hayati) upaya konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	(emisi) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	(emisi) upaya dan pencapaian pengurangan emisi	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1
	(limbah dan efluen) jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
	(limbah dan efluen) mekanisme pengelolaan limbah dan efluen	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
	(limbah dan efluen) tumpahan yang terjadi (jika ada)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

	jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Tanggung jawab pengembangan Produk atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
	jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
	jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah		36	20	29	45	64	29	21	23	38	67
SFD (sustainable financ disclosure)		0,54	0,30	0,43	0,67	0,96	0,43	0,31	0,34	0,57	1
Persentase (%) SFD		54%	30%	43%	67%	96%	43%	31%	34%	57%	100%

Skala usaha	total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
	jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase kepemilikan saham	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	wilayah operasional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	penjelasan singkat produk, layanan dan kegiatan usaha	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	keanggotaan asosiasi	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	perubahan LJK, emiten dan perusahaan publik bersifat signifikan	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
penjelasan direksi											
Kebijakan merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan	penjelasan nilai keberlanjutan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	penjelasan respon LJK, emiten dan perusahaan terhadap isu terkait penerapan keuangan berkelanjutan	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
	Penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1

	Penjelasan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota dewan komisaris, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggungjawab penerapan keuangan berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Penjelasan prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian manajemen, RUPS dan surat keputusan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	pendekatan yang dilakukan LJK, emiten atau perusahaan publik melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan keuangan berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
kinerja keberlanjutan											
	penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK atau emiten	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1

	(masyarakat) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	(masyarakat) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
	(masyarakat) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	(penggunaan energi) jumlah dan intensitas energi yang digunakan	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
	(penggunaan energi) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup	Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	(keanekaragaman hayati) dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(keanekaragaman hayati) upaya konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(emisi) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
	(emisi) upaya dan pencapaian pengurangan emisi	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
	(limbah dan efluen) jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
	(limbah dan efluen) mekanisme pengelolaan limbah dan efluen	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0

	(limbah dan efluen) tumpahan yang terjadi (jika ada)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanggung jawab pengembangan Produk atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
	jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah		24	38	26	55	57	26	24	26	53	56
SFD (sustainable financ disclosure)		0.36	0.57	0.39	0.82	0.85	0.39	0.36	0.39	0.79	0.84
Persentase (%) SFD		36%	57%	39%	82%	85%	39%	36%	39%	79%	84%

Lampiran 13
Rekapan Hasil Perbandingan Seluruh Item 8 Perbankan Per Tahun 2015-2019

Indikator (<i>item</i>) Sustainable Finance Disclosure		Jumlah item per indikator					2015	2016	2017	2018	2019
		2015	2016	2017	2018	2019					
Penjelasan strategi keberlanjutan		4	4	4	6	8	0.0597	0.0597	0.0597	0.0896	0.1194
Iktisar kinerja aspek keberlanjutan											
Aspek ekonomi	Kuantitas produksi atau jasa	0	0	0	5	6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0746	0.0896
	pendapatan	6	5	6	8	8	0.0896	0.0746	0.0896	0.1194	0.1194
	laba atau rugi bersih	7	5	7	8	8	0.1045	0.0746	0.1045	0.1194	0.1194
	produk ramah lingkungan	4	5	3	6	8	0.0597	0.0746	0.0448	0.0896	0.1194
	pelibatan pihak lokal	3	2	1	7	7	0.0448	0.0299	0.0149	0.1045	0.1045
Aspek lingkungan hidup	penggunaan energi	8	6	8	8	8	0.1194	0.0896	0.1194	0.1194	0.1194
	pengurangan emisi	4	3	6	7	8	0.0597	0.0448	0.0896	0.1045	0.1194
	pengurangan limbah dan efluen	3	3	5	7	8	0.0448	0.0448	0.0746	0.1045	0.1194
	pelestarian keanekaragaman hayati	4	2	1	5	8	0.0597	0.0299	0.0149	0.0746	0.1194
Aspek sosial	dampak positif dan negatif dari penerapan keuangan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan	1	1	0	4	7	0.0149	0.0149	0.0000	0.0597	0.1045
profil singkat											
Skala usaha	visi, misi, dan nilai keberlanjutan	8	8	8	8	8	0.1194	0.1194	0.1194	0.1194	0.1194
	nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan	7	8	8	8	8	0.1045	0.1194	0.1194	0.1194	0.1194

Penerapan keuangan berkelanjutan	Pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target	2	2	1	4	6	0.0299	0.0299	0.0149	0.0597	0.0896
	Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan	3	5	6	6	6	0.0448	0.0746	0.0896	0.0896	0.0896
Strategi pencapaian target	Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup	4	4	8	7	6	0.0597	0.0597	0.1194	0.1045	0.0896
	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha	0	0	3	6	5	0.0000	0.0000	0.0448	0.0896	0.0746
	penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, emiten dan perusahaan publik	0	1	0	5	4	0.0000	0.0149	0.0000	0.0746	0.0597
tata kelola keberlanjutan											
Penjelasan mengenai pemangku kepentingan	Uraian tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat atau unit kerja yang penanggungjawab penerapan keuangan berkelanjutan	8	6	7	8	8	0.1194	0.0896	0.1045	0.1194	0.1194
	Penjelasan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota dewan komisaris, pejabat atau unit kerja yang menjadi penanggungjawab penerapan keuangan berkelanjutan	8	6	7	8	8	0.1194	0.0896	0.1045	0.1194	0.1194

	Penjelasan prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan	5	2	5	7	7	0.0746	0.0299	0.0746	0.1045	0.1045
	keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian manajemen, RUPS dan surat keputusan	8	8	7	8	8	0.1194	0.1194	0.1045	0.1194	0.1194
	pendekatan yang dilakukan LJK, emiten atau perusahaan publik melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan keuangan berkelanjutan	8	8	8	8	8	0.1194	0.1194	0.1194	0.1194	0.1194
	permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan keuangan berkelanjutan	0	0	3	6	8	0.0000	0.0000	0.0448	0.0896	0.1194
kinerja keberlanjutan											
	penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK atau emiten	2	1	3	6	8	0.0299	0.0149	0.0448	0.0896	0.1194
Kinerja ekonomi dalam 3 tahun terakhir	Perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan	1	1	2	5	7	0.0149	0.0149	0.0299	0.0746	0.1045
	Perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	1	1	1	5	7	0.0149	0.0149	0.0149	0.0746	0.1045

Kinerja sosial dalam 3 tahun terakhir	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk/jasa yang setara pada konsumen	5	3	4	7	8	0.0746	0.0448	0.0597	0.1045	0.1194
	(Ketenagakerjaan) pernyataan kesetaraan kesempatan kerja dan atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak	0	1	3	7	8	0.0000	0.0149	0.0448	0.1045	0.1194
	(ketenagakerjaan) persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional	4	3	5	8	8	0.0597	0.0448	0.0746	0.1194	0.1194
	(ketenagakerjaan) lingkungan bekerja yang layak dan aman	6	7	6	8	8	0.0896	0.1045	0.0896	0.1194	0.1194
	(ketenagakerjaan) pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai	8	8	8	8	8	0.1194	0.1194	0.1194	0.1194	0.1194
	(masyarakat) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan	1	1	2	6	8	0.0149	0.0149	0.0299	0.0896	0.1194
	(masyarakat) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti	5	4	8	7	8	0.0746	0.0597	0.1194	0.1045	0.1194
	(masyarakat) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat	0	0	2	7	8	0.0000	0.0000	0.0299	0.1045	0.1194
	biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan	3	3	3	6	8	0.0448	0.0448	0.0448	0.0896	0.1194

Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang	4	1	3	6	8	0.0597	0.0149	0.0448	0.0896	0.1194
	(penggunaan energi) jumlah dan intensitas energi yang digunakan	6	5	7	8	8	0.0896	0.0746	0.1045	0.1194	0.1194
	(penggunaan energi) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan	7	6	7	7	6	0.1045	0.0896	0.1045	0.1045	0.0896
Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup	Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik	2	1	2	6	7	0.0299	0.0149	0.0299	0.0896	0.1045
	informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem	1	1	2	3	7	0.0149	0.0149	0.0299	0.0448	0.1045
	(keanekaragaman hayati) dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati	0	0	2	2	6	0.0000	0.0000	0.0299	0.0299	0.0896
	(keanekaragaman hayati) upaya konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna	2	0	2	2	6	0.0299	0.0000	0.0299	0.0299	0.0896
	(emisi) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	4	1	3	4	5	0.0597	0.0149	0.0448	0.0597	0.0746
	(emisi) upaya dan pencapaian pengurangan emisi	4	3	2	5	6	0.0597	0.0448	0.0299	0.0746	0.0896

	(limbah dan efluen) jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenisnya	2	4	4	5	6	0.0299	0.0597	0.0597	0.0746	0.0896
	(limbah dan efluen) mekanisme pengelolaan limbah dan efluen	3	4	4	5	6	0.0448	0.0597	0.0597	0.0746	0.0896
	(limbah dan efluen) tumpahan yang terjadi (jika ada)	0	2	2	2	6	0.0000	0.0299	0.0299	0.0299	0.0896
	jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan	2	3	4	1	6	0.0299	0.0448	0.0597	0.0149	0.0896
Tanggung jawab pengembangan Produk atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	4	4	4	8	8	0.0597	0.0597	0.0597	0.1194	0.1194
	jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan	0	1	1	5	6	0.0000	0.0149	0.0149	0.0746	0.0896
	dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif	2	0	2	7	8	0.0299	0.0000	0.0299	0.1045	0.1194
	jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya	1	0	2	6	6	0.0149	0.0000	0.0299	0.0896	0.0896
	survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	6	6	6	7	7	0.0896	0.0896	0.0896	0.1045	0.1045
Verifikasi tertulis dari pihak independen (jika ada)		0	0	0	3	3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0448	0.0448

